



TEROPONG PENDIDIKAN DI BALI

KAJIAN RAPOR MUTU DAN REKOMENDASINYA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN BALI
2018

TEROPONG PENDIDIKAN DI BALI

(KAJIAN RAPOR MUTU DAN REKOMENDASINYA)

Penulis :

Ni Nengah Nuadi, S.Pd., M.Pd.
Dr. I Wayan Surata, S.Pd., M.Pd.

ISBN :

978-602-51892-1-0

Editor :

I Made Alit Dwitama, ST, M.Pd.

Desain Sampul :

Heru Susanto

Tata Letak :

Gus Ryan

Penerbit :

LPMP BALI
Anggota IKAPI No. 018/BAI/16

Redaksi:

Jl. Letda Tantular No. 14 Niti Mandala Denpasar 80234
Telp. 0361 225666, Fax. 0361 246682
Pos-el : lpmpbali@kemdikbud.go.id
Laman : lpmpbali.kemdikbud.go.id

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apa pun tanpa ijin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

SISTEM penjaminan mutu yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI dilaksanakan oleh satuan pendidikan, sedangkan SPME dilaksanakan oleh institusi di luar satuan pendidikan, seperti: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Standar Nasional Pendidikan, dan Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah. Adanya dukungan dari institusi-institusi tersebut dalam penerapan sistem penjaminan mutu internal sesuai tugas dan kewenangannya akan memperkuat upaya satuan pendidikan dalam memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu sesuai kebutuhan nyata di lapangan.

Teropong pendidikan di Bali ini menggambarkan atau memaparkan analisis peta capaian Standar Nasional Pendidikan, analisis kelemahan dan kekuatan sampai pada rekomendasi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten/Kota dan Provinsi Bali. Ini adalah salah satu wujud Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Bali melakukan tugas dan wewenangnya dalam penerapan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) sesuai yang diamanatkan dalam Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, mulai dari persiapan, pengolahan dan analisis peta mutu sehingga penyusunan buku Teropong pendidikan di Bali dapat terwujud. Semoga Teropong pendidikan ini dapat dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan pendidikan di Kabupaten/Kota maupun di Provinsi Bali.

Denpasar, November 2018
Kepala LPMP Bali

I Made Alit Dwitama, S.T., M.Pd.
NIP 197412252003121004

P R A K A T A

PUJI syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya buku yang berjudul **”Teropong Pendidikan di Bali (Kajian Rapor Mutu dan Rekomendasinya)”** dapat diselesaikan sesuai rencana. Buku ini secara umum menguraikan tentang capaian mutu sekolah dan rencana pemenuhan mutu pendidikan di Provinsi Bali. Berkat kerja keras dan bantuan beberapa pihak sehingga karya yang sederhana ini dapat terwujud. Penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak I Made Alit Dwitama, S.T., M.Pd., selaku Kepala LPMP Bali yang telah memberikan dorongan dan fasilitasi dalam penyusunan buku ini.
2. Ibu Dra. Gusti Ayu Sriati, M.Pd., selaku Kepala Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan LPMP Bali yang turut memberikan motivasi dan sumbangan pemikiran sehingga buku ini menjadi lebih sempurna.
3. Bapak Roni Karsidi, S.H.,M.Si, selaku Kepala Sub Bagian Umum LPMP Bali yang telah memberikan dukungan anggaran dalam mewujudkan buku ini.
4. Ibu Dra. Ni Nyoman Yumiati, M.Pd., selaku Kepala Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi Pendidikan LPMP Bali, yang turut memberikan pemikiran-pemikiran sehingga buku ini menjadi lebih sempurna.
5. Bapak I Gede Mastika, ST., MAP, selaku Kepala Seksi Sistem Informasi LPMP Bali, yang sekaligus sebagai penanggung jawab program yang begitu antusias dalam memberikan motivasi dan sumbangan pemikiran demi sempurnanya buku ini.
6. Rekan-rekan teman sejawat Widyaiswara LPMP Bali yang turut memberikan sumbang saran dan perbaikan buku ini.

Semoga Bapak/Ibu yang telah memberikan pemikiran, motivasi dan keperluan logistik buku ini diberikan kesehatan dan kemakmuran. Kritik dan saran sangat diperlukan dalam penyempurnaan buku. Semoga buku yang sederhana ini dapat dijadikan bahan kebijakan dalam menyusun Rencana Pemenuhan Mutu Pendidikan di Provinsi Bali di tahun berikutnya.

Denpasar, November 2018
Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	2
B. Acuan Formal dan Normatif.....	4
C. Tujuan.....	4
D. Manfaat.....	5
BAB II PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN	7
A. Mutu Pendidikan	8
B. Indikator Mutu Pendidikan.....	11
C. Ruang Lingkup Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan	14
D. Sumber Data Peta Capaian SNP.....	29
E. Kategori Capaian Pemenuhan SNP	29
BAB III HASIL ANALISIS PETA CAPAIAN SNP	31
A. Capaian SNP Sekolah Dasar (SD) di Provinsi Bali	32
B. Capaian SNP Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Provinsi Bali.....	35
C. Capaian SNP Sekolah Menengah Atas (SMA) di Provinsi Bali	38
D. Capaian SNP Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Bali.....	41
E. Capaian SNP untuk Setiap Indikator	44
F. Analisis Kekuatan dan Kelemahan Setiap SNP.....	67
G. Masalah dan Akar Permasalahan	70
H. Rekomendasi	75
BAB IV PENUTUP	79
A. Simpulan.....	80
B. Rekomendasi	81
DAFTAR PUSTAKA	83

DAFTAR GAMBAR

2.1	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikbud No. 28 Tahun 2016)	12
2.2	Siklus Penjaminan Mutu Internal (SPMI).....	13
2.3	Gambaran Umum Indikator Mutu Pendidikan sesuai SNP	14
4.1	Capaian SNP Tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi Bali Tahun 2017	33
4.2	Kuantitas Sekolah dengan Capaian SNP	33
4.3	Capaian SNP Tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi Bali Tahun 2017	36
4.4	Kuantitas Sekolah dengan Capaian SNP	36
4.5	Capaian SNP Tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi Bali Tahun 2017	39
4.6	Kuantitas Sekolah dengan Capaian SNP	40
4.7	Capaian SNP Tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi Bali Tahun 2017	42
4.8	Kuantitas Sekolah dengan Capaian SNP	43

DAFTAR TABEL

2.1	Ruang Lingkup Instrumen PMP Tahun 2017.....	14
4.1	Skor Peta Capaian SNP setiap Standar Tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi Bali Jenjang Sekolah Dasar (SD) Tahun 2017	32
4.2	Skor Peta Capaian SNP Provinsi Bali per Kabupaten/Kota	34
4.3	Capaian SNP Kabupaten/Kota untuk setiap standar	34
4.4	Skor Peta Capaian SNP setiap Standar Tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi Bali Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)Tahun 2017	35
4.5	Skor Peta Capaian SNP Provinsi Bali per Kabupaten/Kota	37
4.6	Capaian SNP kabupaten/Kota untuk setiap standar.....	38
4.7	Skor Peta Capaian SNP setiap Standar Tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi Bali Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) Tahun 2017	38
4.8	Skor Peta Capaian SNP Provinsi Bali per Kabupaten/Kota	40
4.9	Capaian SNP Kabupaten/Kota untuk setiap standar	41
4.10	Skor Peta Capaian SNP setiap Standar Tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi Bali Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun 2017.....	42
4.11	Skor Peta Capaian SNP Provinsi Bali per Kabupaten/Kota	43
4.12	Capaian SNP Kabupaten/Kota untuk setiap standar	44
4.13	Capaian SNP setiap Indikator Kabupaten Buleleng Tahun 2017.....	45
4.14	Capaian SNP setiap Indikator Kabupaten Jembrana Tahun 2017	47
4.15	Capaian SNP setiap Indikator Kabupaten Tabanan Tahun 2017	49
4.16	Capaian SNP setiap Indikator Kabupaten Badung Tahun 2017	51
4.17	Capaian SNP setiap Indikator Kabupaten Gianyar Tahun 2017	53
4.18	Capaian SNP setiap Indikator Kabupaten Klungkung Tahun 2017.....	55
4.19	Capaian SNP setiap Indikator Kabupaten Bangli Tahun 2017.....	57
4.20	Capaian SNP setiap Indikator Kabupaten Karangasem Tahun 2017	59
4.21	Capaian SNP setiap Indikator Kota Denpasar Tahun 2017	62
4.22	Capaian SNP setiap Indikator Provinsi Bali Tahun 2017	64
4.23	Analisis Kekuatan dan Kelemahan SNP di Provinsi Bali tahun 2017	68
4.24	Rekomendasi Fasilitasi Peningkatan Mutu Provinsi Bali Tahun 2017	76





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan diamanatkan bahwa setiap Satuan Pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.

Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan ini merupakan tanggung jawab dari setiap komponen di satuan pendidikan. Sesuai peraturan perundangan yang berlaku setiap satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu sesuai kewenangannya. Peningkatan mutu di satuan pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada seluruh komponen sekolah. Untuk peningkatan mutu sekolah secara utuh dibutuhkan pendekatan khusus agar seluruh komponen sekolah bersama-sama memiliki budaya mutu. Untuk itu dibutuhkan program Implementasi Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia dengan pendekatan pelibatan seluruh komponen sekolah (*whole school approach*).

Sebagai langkah awal rangkaian kegiatan penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan, setiap satuan pendidikan harus mampu melakukan penyusunan peta mutu. Penyusunan peta mutu ini diperlukan agar setiap satuan pendidikan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing berkaitan dengan pencapaian Standar Nasional Pendidikan, sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk mencapai dan bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan.

Dalam konsep Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP),

peningkatan mutu pendidikan harus dilaksanakan dengan berbasis data yang telah dianalisis dengan akurat dan benar. Analisis data ini kemudian menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai *base-line* data untuk merencanakan kegiatan dan program peningkatan mutu secara proporsional, akurat, dan berkelanjutan.

Sekolah/Madrasah adalah pelaku utama dalam proses penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Salah satu alat untuk mengkaji kemajuan peningkatan mutu sekolah secara komprehensif yang berbasis Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah Evaluasi Diri Sekolah (EDS). EDS sebagai salah satu komponen SPMP diharapkan dapat membangun semangat dan kultur penjaminan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Hasil pemetaan mutu pendidikan tersebut selanjutnya akan dianalisis untuk dapat menghasilkan peta mutu dan rekomendasi program peningkatan mutu yang tepat sebagai upaya pemenuhan 8 (delapan) SNP di tingkat sekolah. Berbagai rekomendasi yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis pemetaan mutu pendidikan kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS), untuk jangka waktu menengah dan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang merupakan jangka pendek setiap tahun.

Pemetaan mutu pendidikan diverifikasi oleh Pengawas Sekolah selaku pembina sekolah tersebut. Kegiatan agregasi dan analisis pemetaan mutu pendidikan dilakukan untuk mendapatkan peta tentang capaian 8 (delapan) SNP. Dari hasil analisis ini akan didapat gambaran tentang tahapan pengembangan setiap indikator dari setiap SNP untuk setiap jenjang pendidikan. Analisis ini akan menghasilkan peta mutu dan berbagai rekomendasi yang akurat dan bermanfaat bagi pemerintah kota/kabupaten/provinsi dasar perencanaan sebagai program peningkatan mutu pendidikan di tingkat kota/kabupaten/provinsi yang perlu dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya.

Agregasi data pemetaan mutu pendidikan adalah serangkaian strategi yang dilaksanakan oleh Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD)/Pengawas sekolah tingkat Pemerintah Daerah untuk memonitor dan mengevaluasi mutu dan keefektifan sekolah dan tenaga kependidikan berdasarkan SNP. Hasil agregasi ini menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah kabupaten/kota/provinsi sesuai kewenangannya untuk dapat dipahami dan dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga menjadi suatu budaya mutu di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun tingkat pusat. Hal ini sesuai dengan peran Pemerintah Daerah baik Kabupaten maupun Kota dan Provinsi dalam Sistem Pendidikan Nasional, dalam hal: (1)

menyediakan pelayanan pendidikan; (2) memonitor mutu pendidikan dan pelayanan pendukung pendidikan; (3) membuat laporan mengenai mutu dan kinerja sekolah; dan (4) meningkatkan mutu dan pelayanan pendidikan.

Peta mutu pendidikan ini memaparkan peta capaian mutu SNP Kabupaten/Kota dan Provinsi Bali untuk setiap jenjang pendidikan. Peta capaian mutu SNP dibuat sebagai perwujudan tugas dan wewenang LPMP Bali dalam memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

B. ACUAN FORMAL DAN NONFORMAL

Peta mutu pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi didasari oleh dasar hukum sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

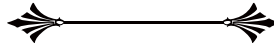
C. TUJUAN

Tujuan disusunnya peta mutu pendidikan (capaian Standar Nasional Pendidikan) Kabupaten/ Kota dan Provinsi Bali adalah untuk mengetahui gambaran ketercapaian mutu pendidikan Kabupaten/

Kota dan Provinsi Bali, dan untuk menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat Kabupaten/ Kota dan Provinsi Bali berdasarkan pemetaan mutu pendidikan dengan harapan dapat mendorong satuan pendidikan maupun pemerintah daerah mengimplementasikan SPMP dengan baik dan berkelanjutan.

D. MANFAAT

Pada akhirnya nanti, peta capaian mutu SNP ini diharapkan dapat menjadi *base-line* pelaksanaan SPMP sebagai elemen *esensial* peningkatan mutu pendidikan sehingga SPMP dapat terlaksana dengan baik dan berkelanjutan sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016.







BAB II

**PEMETAAN
MUTU
PENDIDIKAN**

A. Mutu Pendidikan

Mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa, baik yang *tangible* maupun yang *intangible*. Dalam konteks pendidikan pengertian mutu dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam proses pendidikan yang bermutu terlibat berbagai input, seperti bahan ajar (kognitif, afektif dan psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai dengan kemampuan guru), sarana prasarana sekolah, dukungan administrasi, dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Manajemen sekolah dan manajemen kelas berfungsi untuk mensinergikan semua komponen dalam interaksi (proses) belajar mengajar baik antar guru, siswa dan sarana pendukung di kelas.

Satori (2016) menyatakan bahwa mutu pendidikan adalah nilai dan manfaat yang sesuai dengan standar nasional pendidikan atas *input*, proses, *output*, dan *outcome* pendidikan yang dirasakan oleh pemakai jasa pendidikan dan pengguna hasil pendidikan. Memahami pengertian tentang mutu pendidikan selalu mengedepankan keadaan dan hasil pendidikan yang berada di masyarakat seperti Danim (2002) berpendapat bahwa kualitas pendidikan dilihat dari hasil pendidikan dianggap bermutu jika mampu melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada peserta yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu.

Keunggulan akademik dinyatakan dengan nilai yang dicapai oleh peserta didik. Keunggulan ekstrakurikuler dinyatakan dengan aneka jenis keterampilan yang diperoleh siswa selama mengikuti program ekstrakurikuler. Di luar kerangka itu mutu keluaran juga dapat dilihat dari nilai-nilai hidup yang dianut, moralitas, dorongan untuk maju, dan lain-lain yang diperoleh peserta didik selama mengikuti pendidikan. Djaali (2014) secara spesifik menyatakan bahwa ukuran mutu pendidikan adalah (1) kompetensi lulusan yang dinyatakan

dengan pencapaian kompetensi dasar esensial minimal; (2) kualitas proses pembelajaran di kelas dan proses pendidikan di sekolah.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan adalah nilai tertinggi dari input, proses, output dan outcome pendidikan, dalam kaitannya dengan pemenuhan standar nasional pendidikan, mutu pendidikan diukur melalui evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.

Berkaitan dengan pemetaan mutu, Satori (2016) menyatakan bahwa pemetaan mutu adalah serangkaian kegiatan untuk mengetahui kondisi dan situasi yang menggambarkan peta mutu pendidikan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang dilakukan atas oleh satuan pendidikan, penyelenggara, pemerintah daerah, dan pemerintah dalam kurun waktu tertentu. Mutu pendidikan Indonesia dinilai berdasarkan capaian kinerja satuan pendidikan atas Standar Nasional Pendidikan. Jadi pemetaan mutu pendidikan adalah serangkaian kegiatan untuk mengetahui kondisi dan situasi yang menggambarkan capaian kinerja satuan pendidikan atas SNP dalam suatu kurun waktu yang ditentukan oleh satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan, pemerintah daerah dan pemerintah untuk menghasilkan peta mutu pendidikan.

Peta mutu adalah representasi visual yang menyoroti profil mutu satuan pendidikan dalam wilayah tertentu yang menggambarkan karakteristik mutu satuan pendidikan berdasarkan delapan Standar Nasional Pendidikan. Dengan kata lain peta mutu diperoleh dari suatu proses pemetaan berjenjang mulai dari tingkat satuan pendidikan dengan output berupa profil mutu yang di tingkat berikutnya diintegrasikan dalam batasan wilayah tertentu.

Pengumpulan data dan informasi dari profil satuan pendidikan idealnya dapat digunakan oleh berbagai pihak sebagai dasar pengambilan kebijakan karena pada hakikatnya sebuah peta harus dapat memberikan informasi bagi penggunaannya untuk dapat dimanfaatkan lebih lanjut. Sebagai sebuah media informasi peta mutu harus memiliki kemudahan bagi penggunaannya, kemudahan yang dimaksud berarti adanya kejelasan informasi dan tingkat keterbacaan peta yang cukup tinggi. Untuk itu suatu peta mutu diharapkan dapat disajikan dalam tampilan yang menarik, dengan bahasa yang sederhana dan komunikatif supaya tujuan pembuatan peta mutu dapat tercapai.

Secara umum peta mutu pendidikan disusun untuk dapat digunakan sebagai data awal (*base-line data*) kondisi nyata tentang pemenuhan dan pencapaian ke-8 SNP dan indikatornya yang akan

memudahkan pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan program dan penganggaran peningkatan mutu agar memiliki tujuan, ruang lingkup, sasaran, target, dan tahapan yang jelas. Sumber data dari penyusunan peta mutu di tiap tingkatan wilayah adalah data profil di tingkat satuan pendidikan yang memuat informasi kuantitatif dan kualitatif kondisi satuan pendidikan dalam lingkup Standar Nasional Pendidikan. Agregasi profil satuan pendidikan di tingkat selanjutnya diharapkan dapat disusun untuk menjawab kebutuhan para pemangku kepentingan untuk mendorong satuan pendidikan dalam melakukan upaya penjaminan mutu. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk menyusun profil capaian kinerja satuan pendidikan atas Standar Nasional Pendidikan adalah instrumen Evaluasi Diri Sekolah (EDS). EDS dapat digunakan satuan pendidikan untuk mengumpulkan data entitas satuan pendidikan dan data kualitas layanan pendidikan dengan acuan SNP.

Sebuah siklus dalam konteks sistem penjaminan mutu mensyaratkan *output* proses pemetaan yang berupa peta mutu pendidikan dapat menjadi *input* bagi proses peningkatan mutu berkelanjutan. Secara operasional proses peningkatan mutu yang dilakukan oleh pihak eksternal berupa program supervisi dan fasilitasi kepada satuan pendidikan. Penyusunan program supervisi dan fasilitasi dalam berbagai bentuknya dapat dilakukan apabila peta mutu yang disusun dapat digunakan sesuai kebutuhan. Untuk itu peta mutu pendidikan berbasis hasil capaian SNP hendaknya dapat dikembangkan menjadi peta dengan tema-tema tertentu yang lebih spesifik sesuai data dan informasi yang ada dalam profil satuan pendidikan.

Secara umum peta mutu pendidikan disusun untuk dapat digunakan sebagai data awal (*base-line* data) kondisi nyata tentang pemenuhan dan pencapaian delapan Standar Nasional Pendidikan dan indikatornya yang akan memudahkan pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan program dan penganggaran peningkatan mutu agar memiliki tujuan, ruang lingkup, sasaran, target, dan tahapan yang jelas. Secara khusus tujuan penyusunan peta mutu dapat diturunkan dalam tingkat wilayah sebagai berikut.

1. Pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan agregasi profil mutu satuan pendidikan untuk penyusunan kebijakan, program, dan anggaran pendidikan di wilayah kabupaten/kota.
2. Pemerintah provinsi dapat melakukan pemetaan mutu di daerahnya dan menggunakannya sebagai dasar dalam

penyusunan peraturan daerah tentang pendidikan, perencanaan program dan penganggaran pendidikan, dan koordinasi antarkabupaten/kota dalam pelayanan pendidikan yang bermutu.

3. Pemerintah dapat menggunakan profil mutu satuan pendidikan untuk menyusun peta mutu pendidikan nasional sebagai bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pengalokasian anggaran di sektor pendidikan.

Secara visual peta mutu dapat disajikan dalam berbagai bentuk diagram, carta (daftar), matriks dan narasi dari data dan informasi yang ditampilkan. Sebagai agregat dari sejumlah profil dalam satu wilayah, visualisasi komparatif dari data dan informasi antar profil menjadi suatu alternatif informasi yang dapat ditampilkan dalam peta mutu pendidikan.

B. Indikator Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan dasar dan menengah adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di sekolah. Mutu pendidikan di sekolah cenderung tidak ada peningkatan tanpa diiringi dengan penjaminan mutu pendidikan oleh sekolah. Penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah sendiri merupakan mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan yang ditetapkan.

Penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah merupakan kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu secara sistematis, terencana dan berkelanjutan. Bertujuan memastikan pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. Berfungsi sebagai pengendali penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. Sistem penjaminan mutu dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikbud No. 28 Tahun 2016)

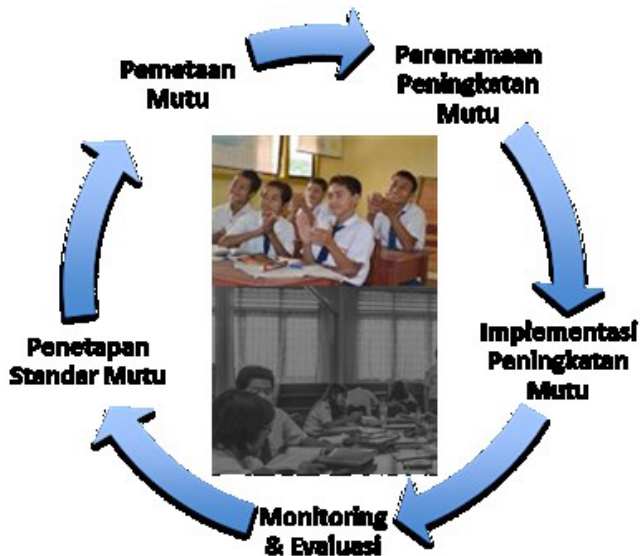
Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri atas sistem penjaminan mutu internal yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen satuan pendidikan, sedangkan sistem penjaminan mutu eksternal dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga akreditasi, dan lembaga standarisasi pendidikan, sedangkan sistem informasi penjaminan mutu menunjang implementasi kedua sistem di atas.

Sistem mengikuti siklus kegiatan sesuai dengan komponen masing-masing Siklus sistem penjaminan mutu internal terdiri atas.

1. Penetapan standar sebagai landasan dimana Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi
2. Pemetaan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan
3. Pembuatan rencana peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah
4. Pelaksanaan pemenuhan mutu baik dalam program kerja maupun proses pembelajaran; dan
5. Evaluasi/audit terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan

Kelima siklus kegiatan dilakukan secara berkelanjutan untuk

mewujudkan pendidikan bermutu. Secara lengkap kelima siklus tersebut disajikan dalam gambar berikut.



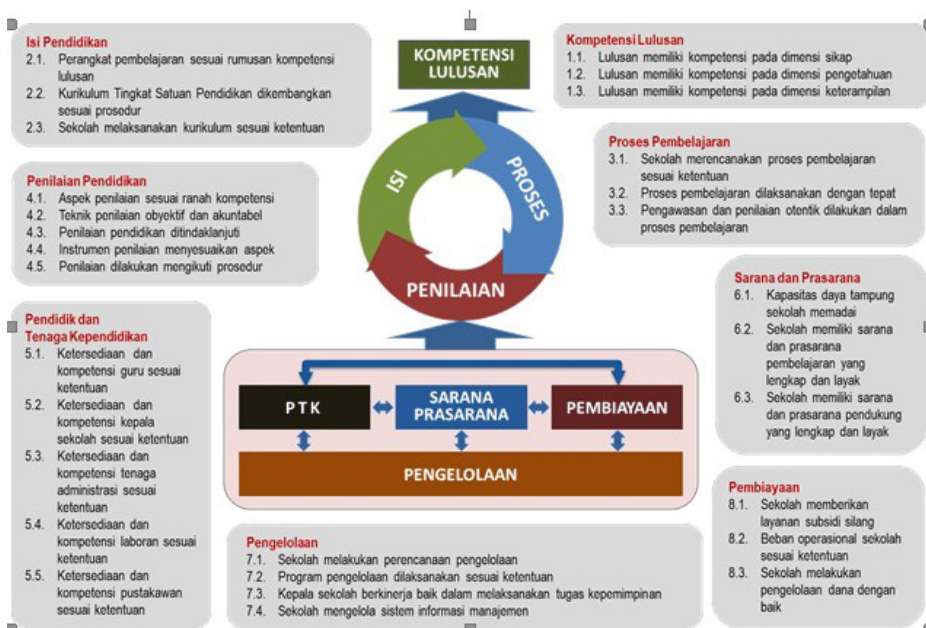
Gambar 2.2 Siklus Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Seluruh siklus ini dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Sementara siklus sistem penjaminan mutu eksternal terdiri atas: (1) pemetaan mutu satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan; (2) perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana strategis; (3) fasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan; (4) monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu; (5) penetapan dan evaluasi Standar Nasional Pendidikan; dan (6) pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan dan/atau program keahlian.

Siklus sistem penjaminan mutu eksternal ini dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga standardisasi (BSNP) dan lembaga akreditasi BAN S/M atau lembaga akreditasi mandiri sesuai kewenangan masing-masing.

Penjaminan mutu pendidikan mengacu pada standar sesuai peraturan yang berlaku. Acuan utama adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah ditetapkan sebagai kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: (1) Standar Kompetensi Lulusan, (2) Standar Isi, (3) Standar Proses, (4) Standar Penilaian, (5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (6) Standar Pengelolaan, (7) Standar Sarana dan Prasarana, dan (8) Standar Pembiayaan.

Kedelapan standar tersebut membentuk rangkaian input, proses, dan output. Standar Kompetensi Lulusan merupakan output dalam rangkaian tersebut dan akan terpenuhi apabila input terpenuhi sepenuhnya dan proses berjalan dengan baik. Standar yang menjadi input dan proses dideskripsikan dalam bentuk hubungan sebab-akibat dengan output. Standar dijabarkan dalam bentuk indikator mutu untuk mempermudah kegiatan pemetaan mutu dalam penjaminan mutu pendidikan. Secara ringkas indikator mutu dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.3 Gambaran Umum Indikator Mutu Pendidikan Sesuai SNP

C. Ruang Lingkup Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan

Pelaksanaan penjaminan mutu oleh satuan pendidikan bertujuan untuk memastikan bahwa keseluruhan unsur yang meliputi organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait pada satuan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk menjamin terwujudnya budaya mutu di satuan pendidikan. Acuan utama sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

SNP adalah standar minimal yang ditetapkan pemerintah dalam

bidang pendidikan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan semua pemangku kepentingan dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan, yang terdiri atas: (1) Standar Kompetensi Lulusan; (2) Standar Isi; (3) Standar Proses; (4) Standar Penilaian; (5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; (6) Standar Pengelolaan; (7) Standar Sarana dan Prasarana; dan (8) Standar Pembiayaan

Pengumpulan data mutu pendidikan Tahun 2017 berdasarkan 8 SNP dilaksanakan pada pertengahan tahun melalui aplikasi PMP yang merupakan bagian dari aplikasi Dapodik. Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan yang digunakan dalam program SPMP Tahun 2017 terdiri atas 8 (delapan) SNP yang tertuang dalam 43 indikator dan 195 sub indikator, yaitu:

Kode Standar	Standar	Kode Indikator	Indikator	Kode Sub Indikator	Sub Indikator
1.	Standar Kompetensi Lulusan (SKL)	1.1	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap	1.1.1	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME
				1.1.2	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap berkarakter
				1.1.3	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur.
				1.1.4	Memiliki perilaku yang mencerminkan peduli
				1.1.5	Memiliki perilaku yang mencerminkan percaya diri
				1.1.6	Memiliki perilaku yang mencerminkan bertanggung jawab
				1.1.7	Memiliki perilaku pembelajar sejati sepanjang hayat
				1.1.8	Memiliki perilaku sehat jasmani dan rohani
				1.1.9	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap disiplin
				1.1.10	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap santun

Kode Standar	Standar	Kode Indikator	Indikator	Kode Sub Indikator	Sub Indikator
			Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan	1.2.1	Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif
			Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan	1.3.1	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif
				1.3.2	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak produktif
				1.3.3	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kritis
				1.3.4	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak mandiri
				1.3.5	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kolaboratif
				1.3.6	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak
2	Standar Isi		Muatan sesuai dengan rancangan Kurikulum Nasional	2.1.1	Mengandung muatan nasional
				2.1.2	Pengembangan materi sesuai prinsip-prinsip KTSP
				2.1.3	Pengembangan kompetensi dasar muatan lokal
			Rancangan mata pelajaran dan beban belajar memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan	2.2.1	Daftar mata pelajaran dan alokasi waktu sesuai SNP
				2.2.2	Jam pelajaran per minggu sesuai SNP
				2.2.3	Beban pelajaran per semester sesuai SNP
			KTSP Sesuai Kurikulum Nasional	2.3.1	Memiliki perangkat pembelajaran KTSP
				2.3.2	Sosialisasi perangkat kepada pemangku kepentingan

Kode Standar	Standar	Kode Indikator	Indikator	Kode Sub Indikator	Sub Indikator
				2.3.3	Pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan KTSP
3.	Standar Proses		Proses pembelajaran sesuai SNP	3.1.1	Pembelajaran mendorong peserta didik mencari tahu
				3.1.2	Pembelajaran berbasis aneka sumber belajar
				3.1.3	Pembelajaran menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah
				3.1.4	Pembelajaran berbasis kompetensi
				3.1.5	Pembelajaran terpadu
				3.1.6	Pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi
				3.1.7	Pembelajaran menuju keterampilan aplikatif
				3.1.8	Pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat
				3.1.9	pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas
				3.1.10	Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran.

Kode Standar	Standar	Kode Indikator	Indikator	Kode Sub Indikator	Sub Indikator
				3.1.11	Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik
				3.1.12	Pengelolaan kelas dan kegiatan pembelajaran dilakukan mulai awal pembelajaran hingga akhir proses pembelajaran
		3.2	Perencanaan proses Pembelajaran sesuai SNP	3.2.1	Guru membuat RPP
				3.2.2	RPP dievaluasi oleh kepala sekolah
				3.2.3	Isi RPP sesuai Kurikulum Nasional
				3.2.4	Penyusunan RPP melibatkan pemangku kepentingan.
				3.2.5	Kualitas dokumen RPP sesuai Kurikulum Nasional
4.	Standar Penilaian Pendidikan	4.1	Proses penilaian dilakukan dengan objektif dan terpadu	4.1.1	Mengacu pada kesesuaian KI KD dalam Kurikulum
				4.1.2	Kesesuaian antara indikator materi dan soal
		4.2	Sekolah menerapkan penilaian yang akuntabel	4.2.1	Perangkat yang terdiri atas prosedur, kriteria, dasar penilaian, instrumen dan cara perhitungan.
				4.2.2	Penggunaan teknik sesuai dimensi kompetensi yang dinilai.
		4.3	Penilaian dilakukan dengan transparan	4.3.1	Keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan
				4.3.2	Dokumen bisa diakses oleh pihak terkait
		4.4	Edukatif-mendidik dan memotivasi siswa dan guru	4.4.1	Redaksi instrumen mendidik

Kode Standar	Standar	Kode Indikator	Indikator	Kode Sub Indikator	Sub Indikator
				4.4.2	Digunakan sebagai dasar evaluasi dan ditindaklanjuti dengan remedial atau pengayaan siswa serta perbaikan proses pembelajaran
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5.1	Jumlah dan kualifikasi Guru sesuai SNP	5.1.1	Seluruh guru minimal S1/D4
				5.1.2	Rasio guru kelas dan rombel = 1 guru kelas
				5.1.3	Minimal sekolah memiliki satu guru per mata pelajaran
		5.2	Kualifikasi Kepala Sekolah sesuai SNP	5.2.1	Kualifikasi Kepala Sekolah minimal S1/D4
				5.2.2	Maksimal waktu diangkat 56 tahun
				5.2.3	Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun
				5.2.4	Memiliki pangkat serendahrendahnya III/c atau setara
		5.3	Ketersediaan Kepala Tenaga Administrasi	5.3.1	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi
				5.3.2	Berpendidikan minimal lulusan SMK atau yang sederajat.
				5.3.3	Memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah/ madrasah
5.4	Pelaksanaan Urusan Administrasi	5.4.1	Memiliki tenaga pelaksana urusan administrasi minimal 1		
		5.5	Ketersediaan Kepala Perpustakaan Sekolah	5.5.1	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan

Kode Standar	Standar	Kode Indikator	Indikator	Kode Sub Indikator	Sub Indikator
				5.5.2	Berpendidikan minimal lulusan S1/D4 (untuk pendidik) atau D2 (untuk non pendidik)
				5.5.3	Memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan
				5.5.4	Masa kerja 3 tahun (pendidik) atau 4 tahun (non pendidik)
		5.6	Tenaga Perpustakaan sekolah	5.6.1	Memiliki tenaga perpustakaan minimal 1
				5.6.2	Lulusan SMA/MA/ SMK/MAK
		5.7	Ketersediaan tenaga laboratorium	5.7.1	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi
				5.7.2	Berpendidikan minimal lulusan S1/ D4 (untuk pendidik) atau D3 (untuk non pendidik)
				5.7.3	Memiliki sertifikat kepala laboratorium
				5.7.4	Masa Kerja 3 tahun (pendidik) atau 5 tahun (non pendidik)
		5.8	Tenaga Teknisi Laboran	5.8.1	Memiliki teknisi laboran minimal 1
				5.8.2	Lulusan D2 terkait laboratorium
		5.9	Tenaga Laboran	5.9.1	Memiliki tenaga laboran minimal 1
				5.9.2	Lulusan D1 terkait laboratorium
		5.10	Kompetensi guru sesuai SNP	5.10.1	Guru memiliki sertifikat pendidik
5.10.2	Kompetensi pedagogik minimal baik.				

Kode Standar	Standar	Kode Indikator	Indikator	Kode Sub Indikator	Sub Indikator
				5.10.3	Kompetensi kepribadian minimal baik.
				5.10.4	Kompetensi profesional minimal baik
		5.11	Kompetensi Kepala Sekolah sesuai SNP	5.11.1	Kepala sekolah memiliki sertifikat pendidik
				5.11.2	Kepala sekolah memiliki sertifikat kepala sekolah
				5.11.3	Kompetensi kepribadian minimal baik
				5.11.4	Kompetensi manajerial minimal baik
				5.11.5	Kompetensi kewirausahaan minimal baik.
				5.11.6	Kompetensi supervisi minimal baik
				5.11.7	Kompetensi sosial minimal baik.
		5.12	Kompetensi kepala administrasi sesuai SNP	5.12.1	Kompetensi kepribadian minimal baik
				5.12.2	Kompetensi sosial minimal baik
				5.12.3	Kompetensi teknis minimal baik.
				5.12.4	Kompetensi manajerial minimal baik.
		5.13	Kompetensi pelaksana urusan administrasi sesuai SNP	5.13.1	Kompetensi kepribadian minimal baik.
				5.13.2	Kompetensi sosial minimal baik
				5.13.3	Kompetensi teknis minimal baik.

Kode Standar	Standar	Kode Indikator	Indikator	Kode Sub Indikator	Sub Indikator
		5.14	Kompetensi kepala perpustakaan sesuai SNP	5.14.1	Kompetensi manajerial minimal baik
				5.14.2	Kompetensi pengelolaan informasi minimal baik.
				5.14.3	Kompetensi kependidikan minimal baik
				5.14.4	Kompetensi kepribadian minimal baik.
				5.14.5	Kompetensi sosial minimal baik
				5.14.6	Kompetensi pengembangan profesi minimal baik.
		5.15	Kompetensi tenaga perpustakaan sesuai SNP	5.15.1	Kompetensi pengelolaan informasi minimal baik.
				5.15.2	Kompetensi kependidikan minimal baik
				5.15.3	Kompetensi kepribadian minimal baik.
				5.15.4	Kompetensi sosial minimal baik
				5.15.5	Kompetensi pengembangan profesi minimal baik
		5.16	Kompetensi Kepala Laboratorium sesuai SNP	5.16.1	Kompetensi kepribadian minimal baik.
				5.16.2	Kompetensi sosial minimal baik
				5.16.3	Kompetensi manajerial minimal baik
				5.16.4	Kompetensi profesional minimal baik

Kode Standar	Standar	Kode Indikator	Indikator	Kode Sub Indikator	Sub Indikator
		5.17	Kompetensi Teknisi Laboran sesuai SNP	5.17.1	Kompetensi kepribadian minimal baik.
				5.17.2	Kompetensi sosial minimal baik
				5.17.3	Kompetensi administrasi minimal baik
				5.17.4	Kompetensi profesional minimal baik
		5.18	Kompetensi laboran sesuai SNP	5.18.1	Kompetensi kepribadian minimal baik
				5.18.2	Kompetensi sosial minimal baik
				5.18.3	Kompetensi administratif minimal baik.
				5.18.4	Kompetensi profesional minimal baik.
6	Standar Sarana dan Prasarana	6.1	Kapasitas dan daya tampung sekolah sesuai SNP	6.1.1	Kapasitas rombongan belajar sesuai standar
				6.1.2	Rasio siswa per rombel sesuai standar
				6.1.3	Rasio luas lahan sesuai dengan jumlah siswa
				6.1.4	Kondisi dan lokasi lahan sekolah sesuai dengan SNP
				6.1.5	Rasio luas bangunan sesuai dengan jumlah siswa
				6.1.6	Kondisi dan lokasi bangunan sekolah sesuai dengan SNP
		6.2	Kelengkapan jumlah sarana dan prasarana pembelajaran	6.2.1	Memiliki ruang kelas sesuai standar
				6.2.2	Memiliki laboratorium IPA sesuai standar

Kode Standar	Standar	Kode Indikator	Indikator	Kode Sub Indikator	Sub Indikator
				6.2.3	Memiliki ruang perpustakaan sesuai standar
				6.2.4	Memiliki tempat bermain/lapangan sesuai standar
				6.2.5	Memiliki laboratorium biologi sesuai standar
				6.2.6	Memiliki laboratorium fisika sesuai standar
				6.2.7	Memiliki laboratorium kimia sesuai standar
				6.2.8	Memiliki laboratorium komputer sesuai standar
				6.2.9	Memiliki laboratorium Bahasa sesuai dengan standar
				6.2.10	Memiliki ruang praktik gambar teknik sesuai standar (SMK)
		6.3	Kelengkapan jumlah sarana dan prasarana Pendukung	6.3.1	Memiliki ruang pimpinan sesuai standar
				6.3.2	Memiliki ruang guru sesuai standar
				6.3.3	Memiliki ruang UKS sesuai standar
				6.3.4	Memiliki tempat ibadah sesuai standar
				6.3.5	Memiliki jamban sesuai standar
				6.3.6	Memiliki gudang sesuai standar
				6.3.7	Memiliki ruang sirkulasi sesuai standar.
				6.3.8	Memiliki ruang tata usaha sesuai standar

Kode Standar	Standar	Kode Indikator	Indikator	Kode Sub Indikator	Sub Indikator
				6.3.9	Memiliki ruang konseling sesuai standar
		6.4		6.3.10	Memiliki ruang organisasi kesiswaan sesuai standar
			Kondisi sarana dan prasarana pembelajaran	6.4.1	Kondisi ruang kelas layak pakai
				6.4.2	Kondisi laboratorium IPA layak pakai
				6.4.3	Kondisi ruang perpustakaan layak pakai
				6.4.4	Kondisi tempat bermain/lapangan layak pakai
				6.4.5	Kondisi laboratorium biologi layak pakai
				6.4.6	Kondisi laboratorium fisika layak pakai
				6.4.7	Kondisi laboratorium kimia layak pakai
				6.4.8	Kondisi laboratorium komputer layak pakai
				6.4.9	Kondisi laboratorium bahasa layak pakai
				6.4.10	Kondisi ruang praktik gambar teknik layak pakai (SMK)
		6.5	Kondisi sarana dan prasarana pendukung	6.5.1	Kondisi ruang pimpinan layak pakai
				6.5.2	Kondisi ruang guru layak pakai
				6.5.3	Kondisi ruang UKS layak pakai
				6.5.4	Kondisi tempat ibadah layak pakai
				6.5.5	Kondisi jamban sesuai standar

Kode Standar	Standar	Kode Indikator	Indikator	Kode Sub Indikator	Sub Indikator
				6.5.6	Kondisi gudang layak pakai
				6.5.7	Kondisi ruang sirkulasi layak pakai
				6.5.8	Kondisi ruang tata usaha layak pakai
				6.5.9	Kondisi ruang konseling layak pakai
				6.5.10	Kondisi ruang organisasi kesiswaan layak pakai
7	Standar Pengelolaan	7.1	Perencanaan program dilaksanakan sesuai standar yang melibatkan pemangku kepentingan	7.1.1	Dokumen pengelolaan disusun berdasarkan pemetaan kondisi sekolah serta visi, misi, dan tujuan sekolah
				7.1.2	Ruang lingkup dokumen pengelolaan minimal sesuai standar
				7.1.3	Perencanaan dilakukan bersama oleh Pemangku kepentingan sekolah serta disosialisasikan kepada seluruh Pemangku kepentingan sekolah
		7.2	Pelaksanaan program dilaksanakan sesuai dengan standar dan melibatkan pemangku kepentingan	7.2.1	Kelengkapan pedoman pengelolaan sekolah
				7.2.2	Penerimaan Siswa berjalan dengan obyektif, transparan, dan akuntabel
				7.2.3	Penyediaan layanan konseling, ekstra kurikuler, pembinaan prestasi dan pelacakan alumni

Kode Standar	Standar	Kode Indikator	Indikator	Kode Sub Indikator	Sub Indikator
				7.2.4	Pengembangkan program peningkatan kapasitas SDM
				7.2.5	Pembentukan suasana, iklim, dan Lingkungan pendidikan yang kondusif untuk pembelajaran yang efisien dalam prosedur pelaksanaan
				7.2.6	Pelibatan warga dan masyarakat pendukung sekolah/ madrasah dalam mengelola pendidikan
				7.2.7	Pendidik dan tenaga kependidikan berkinerja baik
		7.3	Sekolah melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program secara berkala	7.3.1	Sekolah memiliki program pengawasan dan disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan
				7.3.2	Pemantauan pengelolaan sekolah/madrasah dilakukan oleh komite sekolah/ madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan
				7.3.3	Supervisi pengelolaan akademik dilakukan oleh kepala sekolah/ madrasah dan pengawas sekolah/ madrasah
				7.3.4	Sekolah melaporkan hasil evaluasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan

Kode Standar	Standar	Kode Indikator	Indikator	Kode Sub Indikator	Sub Indikator
				7.3.5	Sekolah melakukan evaluasi dan tindak lanjut hasil pengawasan
		7.4	Kepala sekolah berkinerja baik	7.4.1	Kepribadian dan Sosial
				7.4.2	Kepemimpinan
				7.4.3	Pengembangan Sekolah/Madrasah
				7.4.4	Pengelolaan Sumber Daya
				7.4.5	Kewirausahaan
				7.4.6	Supervisi
		7.5	Sekolah mengelola sistem informasi sekolah	7.5.1	Sekolah memiliki SIM
8	Standar Pembiayaan	8.1	Sekolah tidak memungut biaya dari peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi	8.1.1	Setiap siswa yang tidak mampu tidak dipungut biaya pendidikan
				8.1.2	Sekolah memiliki daftar siswa dengan latar belakang ekonomi yang jelas
				8.1.3	Sekolah/Madrasah melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu
		8.2	Biaya operasional non personil minimal sesuai standar (total anggaran sekolah dikurangi biaya investasi dan gaji PTK dibagi total jumlah siswa)	8.2.1	Biaya operasional non personil minimal sesuai standar (total anggaran sekolah dikurangi biaya investasi dan gaji PTK dibagi total jumlah siswa)

Kode Standar	Standar	Kode Indikator	Indikator	Kode Sub Indikator	Sub Indikator
		8.3	Pengelolaan dana yang masuk ke sekolah dilakukan secara transparan dan akuntabel (laporan, dapat diakses, dapat diaudit)	8.3.1	alokasi dana yang berasal dari APBD/APBN/ Yayasan/ sumber lainnya
				8.3.2	Sekolah memiliki laporan pengelolaan dana
				8.3.3	Laporan dapat diakses oleh pemangku kepentingan

D. Sumber Data Peta Capaian SNP

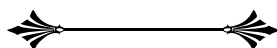
Data yang digunakan dalam pengolahan dan analisis peta capaian SNP Tahun 2017 ini diperoleh dari data yang terkumpul di server pusat per 6 Desember 2017 yang mencapai 90% yang meliputi: (1) Standar Kompetensi Lulusan; (2) Standar Isi; (3) Standar Proses; (4) Standar Penilaian; (5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (6) Standar Sarana dan Prasarana, (7) Standar Pengelolaan, dan (8) Standar Pembiayaan.

Data yang digunakan dalam pengolahan peta capaian SNP Provinsi Bali ini adalah data sekolah yang terkirim lengkap untuk semua jenis responden dan diterima di server pusat per 30 November 2017.

E. Kategori Capaian Pemenuhan SNP

Skor capaian pemenuhan SNP berkisar antara 0 – 7. Untuk dapat mengetahui capaian pemenuhan SNP, maka dibuat pengkategorian untuk memudahkan analisis, yaitu:

1. Menuju SNP level 1 : skor $\leq 2,04$
2. Menuju SNP level 2 : $2,05 \leq \text{skor} \leq 3,70$
3. Menuju SNP level 3 : $3,71 \leq \text{skor} \leq 5,06$
4. Menuju SNP level 4 : $5,07 \leq \text{skor} \leq 6,66$
5. SNP : $6,67 \leq \text{skor} \leq 7,00$







BAB III

**HASIL
ANALISIS PETA
CAPAIAN SNP**

A. Capaian SNP Sekolah Dasar (SD) di Provinsi Bali

1. Gambaran Umum Capaian SNP

Capaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) Provinsi Bali untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) Tahun 2017 melalui pemetaan mutu pendidikan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah disajikan dalam tabel berikut.

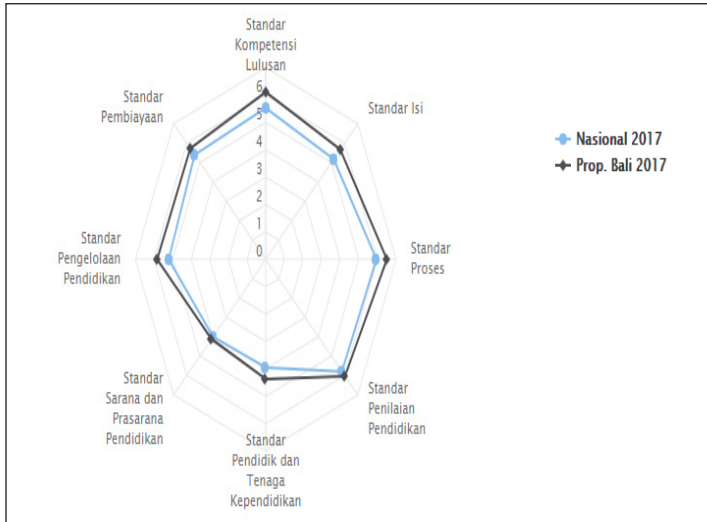
Tabel 4.1 Skor Peta Capaian SNP Setiap Standar Tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi Bali Jenjang Sekolah Dasar (SD) Tahun 2017

JENJANG SD	NASIONAL	PROV.BALI
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	5.40	6.11
STANDAR ISI	5.17	5.67
STANDAR PROSES	5.95	6.52
STANDAR PENILAIAN	5.79	6.03
STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	3.95	4.38
STANDAR SARANA DAN PRASARANA	4.00	4.12
STANDAR PENGELOLAAN	5.21	5.84
STANDAR PEMBIAYAAN	5.40	5.73

Dari data tabel 4.1 di atas, capaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) masing-masing standar untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) di Provinsi Bali secara umum lebih tinggi dari capaian SNP masing-masing standar jenjang SD tingkat Nasional. Namun demikian capaian mutu setiap standar di tingkat Nasional dan tingkat Provinsi Bali belum mencapai SNP. Di Provinsi Bali Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan capaian mutunya menuju SNP 4. Sedangkan capaian mutu pada Standar Pendidik dan Tenaga

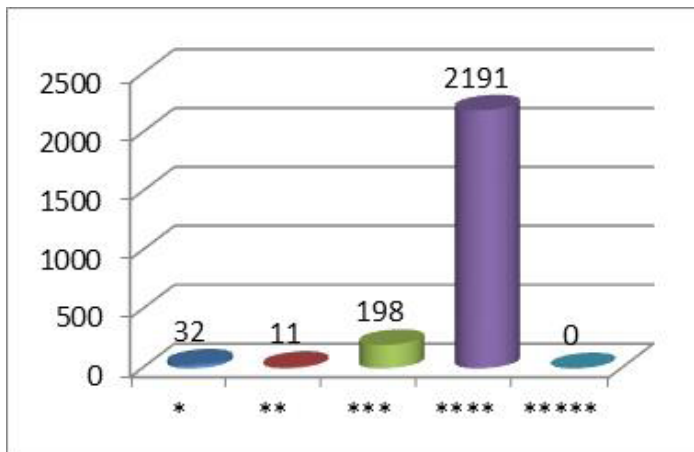
Kependidikan, dan Standar Sarana dan Prasarana masih ada pada capaian mutu menuju SNP 3.

Capaian SNP tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi Bali Jenjang Sekolah Dasar (SD) disajikan seperti grafik 4.1 berikut.



Grafik 4.1 Capaian SNP Tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi Bali Tahun 2017

Gambaran tentang jumlah sekolah terhadap capaian SNP jenjang SD di Provinsi Bali digambarkan dalam grafik 4.2 berikut.



Grafik 4.2 Kuantitas Sekolah dengan Capaian SNP

Berdasarkan grafik 4.2 di atas, secara umum capaian SNP sekolah ada pada capaian mutu menuju SNP 4 yaitu sebanyak 2191 sekolah. Capaian mutu menuju SNP 3 sebanyak 198 sekolah. Capaian mutu menuju SNP 2 sebanyak 11 sekolah, dan masih 32 sekolah yang

capaian mutunya menuju SNP 1. Berdasarkan grafik tersebut, belum ada Sekolah yang mencapai SNP.

Tabel 4.2 Skor Peta Capaian SNP Provinsi Bali per Kabupaten/Kota

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Capaian SNP	Predikat
PROVINSI	5.55	Menuju SNP 4
BADUNG	5.74	Menuju SNP 4
BANGLI	5.63	Menuju SNP 4
BULELENG	5.59	Menuju SNP 4
GIANYAR	5.40	Menuju SNP 4
JEMBRANA	5.62	Menuju SNP 4
KARANGASEM	5.48	Menuju SNP 4
KLUNGKUNG	5.54	Menuju SNP 4
TABANAN	5.55	Menuju SNP 4
DENPASAR	5.44	Menuju SNP 4

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa rata-rata capaian SNP setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali secara umum ada pada rentang 5,07 – 6,66 atau ada pada capaian menuju SNP 4. Rata-rata capaian SNP di Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Jembrana melampaui rata-rata capaian SNP di Provinsi Bali. Sedangkan Kabupaten Gianyar, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan dan Kota Denpasar masih berada di bawah rata-rata Capaian SNP Provinsi Bali. Capaian SNP Kabupaten Gianyar paling rendah di antara capaian SNP Kabupaten yang lain.

2. Capaian SNP untuk Setiap Standar

Capaian SNP untuk setiap standar jenjang Sekolah Dasar (SD) di Provinsi Bali untuk setiap Kabupaten/Kota disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.3 Capaian SNP Kabupaten/Kota untuk setiap standar

STANDAR	WILAYAH								
	BLLNG	JMBRN	TAB	BADUNG	GIANYAR	KLK	BANGLI	K.ASEM	DPS
SKL	6,07	6,16	6,18	6,42	5,97	6,07	6,15	5,93	6,15
ISI	5,69	5,69	5,71	5,97	5,47	5,67	5,74	5,61	5,51
PROSES	6,55	6,55	6,55	6,73	6,37	6,47	6,58	6,42	6,43
PENILAIAN	5,95	6,02	6,01	6,24	6,02	5,99	6,12	5,97	6,07
PTK	4,52	4,59	4,17	4,55	4,02	4,45	4,46	4,31	4,43
SARPRAS	4,20	4,25	4,07	4,23	4,00	4,07	4,21	4,03	4,05
PENGELOLAAN	5,84	5,89	5,86	6,17	5,64	5,76	5,92	5,76	5,70
PEMBIAYAAN	5,88	5,83	5,83	5,58	5,67	5,81	5,88	5,78	5,19

Dari tabel 4.3 di atas, secara umum capaian mutu Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan untuk setiap kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali ada pada capaian mutu menuju SNP 4. Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) dan Standar Sarana dan Prasarana (Sarpras) secara umum ada pada capaian mutu menuju SNP 3. Namun demikian Kabupaten Badung capain mutu Standar Proses sudah mencapai SNP.

B. Capaian SNP Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Provinsi Bali

1. Gambaran Umum Capaian SNP

Capaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) Provinsi Bali untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2017 melalui pemetaan mutu pendidikan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah disajikan dalam tabel berikut.

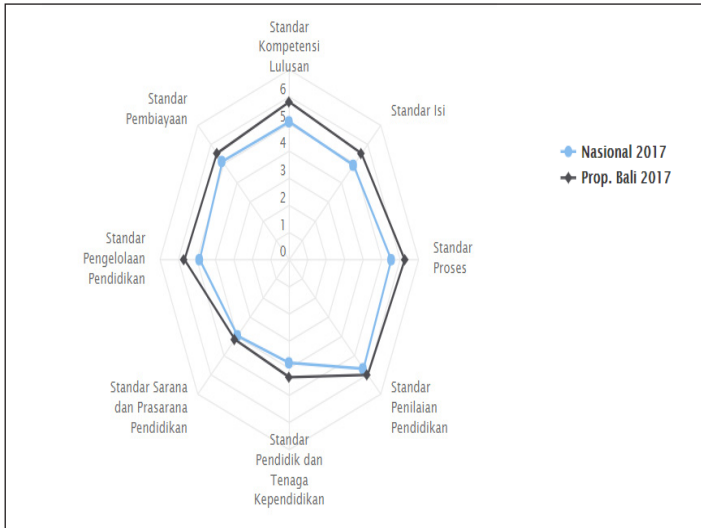
Tabel 4.4 Skor Peta Capaian SNP Setiap Standar Tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi Bali Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2017

JENJANG SMP	NASIONAL	PROV.BALI
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	5.08	5.82
STANDAR ISI	4.92	5.53
STANDAR PROSES	5.52	6.26
STANDAR PENILAIAN	5.68	6.00
STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	3.80	4.34
STANDAR SARANA DAN PRASARANA	3.96	4.17
STANDAR PENGELOLAAN	4.85	5.67
STANDAR PEMBIAYAAN	5.12	5.55

Dari data tabel 4.4 di atas, capaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) masing-masing standar untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Provinsi Bali secara umum lebih tinggi dari capaian SNP masing-masing standar jenjang SMP tingkat Nasional. Namun demikian capaian setiap standar di tingkat Nasional dan tingkat Provinsi Bali belum mencapai SNP. Di Provinsi Bali Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan capaian mutunya menuju SNP 4. Sedangkan capaian pada Standar Pendidik dan

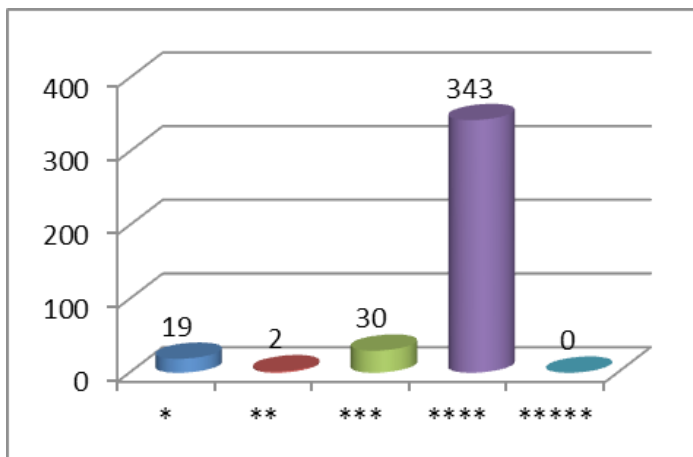
Tenaga Kependidikan, dan Standar Sarana dan Prasarana, masih pada capaian mutu menuju SNP 3.

Capaian SNP tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi Bali Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) disajikan dalam grafik 4.3 berikut.



Grafik 4.3 Capaian SNP Tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi Bali Tahun 2017

Gambaran tentang jumlah sekolah terhadap capaian SNP jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Provinsi Bali digambarkan dalam grafik 4.4 berikut.



Grafik 4.4 Kuantitas Sekolah dengan Capaian SNP

Berdasarkan grafik 4.4 di atas, secara umum capaian SNP sekolah ada pada capaian mutu menuju SNP 4 yaitu sebanyak 343 sekolah. Capaian mutu menuju SNP 3 sebanyak 30 sekolah. Capaian mutu menuju SNP 2 sebanyak 2 sekolah, dan masih 19 sekolah yang capaian mutunya menuju SNP 1. Berdasarkan grafik tersebut, belum ada Sekolah yang mencapai SNP.

Tabel 4.5 Skor Peta Capaian SNP Provinsi Bali per Kabupaten/Kota

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Capaian SNP	Predikat
PROVINSI	5.46	Menuju SNP 4
BADUNG	5.39	Menuju SNP 4
BANGLI	5.70	Menuju SNP 4
BULELENG	5.31	Menuju SNP 4
GIANYAR	5.17	Menuju SNP 4
JEMBRANA	5.74	Menuju SNP 4
KARANGASEM	5.19	Menuju SNP 4
KLUNGKUNG	5.61	Menuju SNP 4
TABANAN	5.59	Menuju SNP 4
DENPASAR	5.49	Menuju SNP 4

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa rata-rata capaian SNP setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali secara umum ada pada rentang 5,07 – 6,66 atau ada pada capaian menuju SNP 4. Rata-rata capaian SNP di Kabupaten Bangli, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan dan Kota Denpasar melampaui rata-rata capaian SNP di Provinsi Bali. Sedangkan Kabupaten Badung, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Karangasem, masih berada di bawah rata-rata Capaian SNP Provinsi Bali. Capaian SNP Kabupaten Gianyar paling rendah di antara capaian SNP Kabupaten yang lain.

2. Capaian SNP untuk Setiap Standar

Capaian SNP untuk setiap standar jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Provinsi Bali untuk setiap kabupaten/kota disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.6 Capaian SNP Kabupaten/Kota untuk setiap standar

STANDAR	WILAYAH								
	BLLNG	JMBRN	TAB	BADUNG	GIANYAR	KLK	BANGLI	K.ASEM	DPS
SKL	5,69	6,14	5,94	5,81	5,32	6,15	6,23	5,41	6,13
ISI	5,34	5,74	5,65	5,50	5,27	5,78	5,88	5,22	5,83
PROSES	6,10	6,67	6,42	6,19	5,76	6,70	6,72	5,83	6,54
PENILAIAN	5,66	6,16	6,05	6,03	6,20	6,25	5,97	5,96	6,13
PTK	4,54	4,91	4,68	4,20	4,35	4,17	4,50	4,30	3,75
SARPRAS	4,11	4,34	4,22	4,35	4,00	3,91	4,30	4,01	4,28
PENGELOLAAN	5,46	6,08	5,88	5,72	5,16	6,18	6,11	5,25	5,90
PEMBIAYAAN	5,59	5,91	5,85	5,31	5,32	5,70	5,92	5,51	5,32

Dari tabel 4.6 di atas, secara umum capaian mutu Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan untuk setiap kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali ada pada capaian mutu menuju SNP 4. Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) dan Standar Sarana dan Prasarana (Sarpras) secara umum ada pada capaian mutu menuju SNP 3. Namun demikian Kabupaten Jembrana, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Bangli di Standar Proses capaian mutunya sudah mencapai SNP.

C. Capaian SNP Sekolah Menengah Atas (SMA) di Provinsi Bali

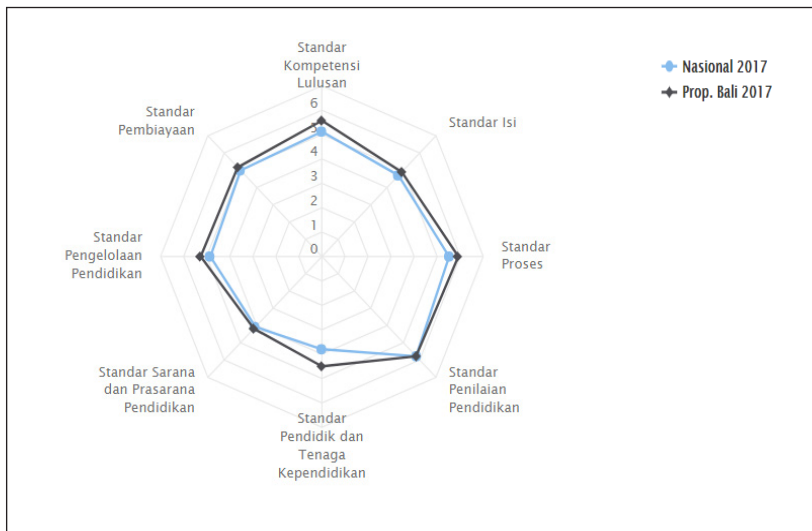
1. Gambaran Umum Capaian SNP

Capaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) Provinsi Bali untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) Tahun 2017 melalui pemetaan mutu pendidikan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.7 Skor Peta Capaian SNP Setiap Standar Tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi Bali Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) Tahun 2017

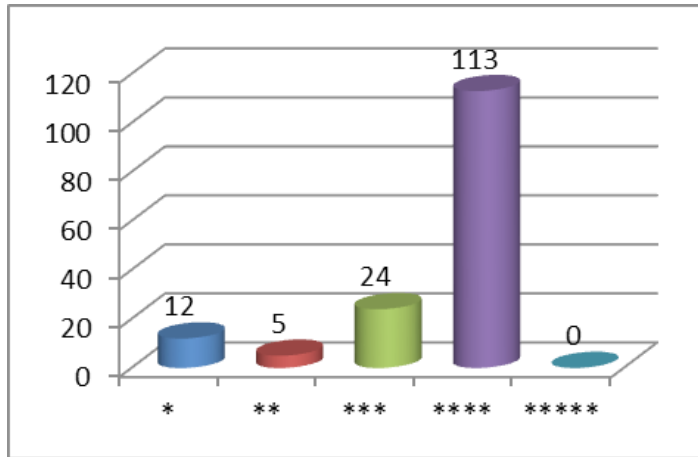
JENJANG SMA	NASIONAL	PROV.BALI
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	5.12	5.57
STANDAR ISI	4.70	4.90
STANDAR PROSES	5.52	5.92
STANDAR PENILAIAN	5.78	5.78
STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	3.80	4.50
STANDAR SARANA DAN PRASARANA	4.08	4.19
STANDAR PENGELOLAAN	4.84	5.26
STANDAR PEMBIAYAAN	4.99	5.18

Dari data tabel 4.7 di atas, capaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) masing-masing standar untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di Provinsi Bali secara umum lebih tinggi dari capaian SNP masing-masing standar jenjang SMA tingkat Nasional. Namun demikian pada Standar Penilaian capaian mutu sama dengan capaian tingkat Nasional. Capaian setiap standar di tingkat Nasional dan tingkat Provinsi Bali belum mencapai SNP. Di Provinsi Bali Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan capaian mutunya menuju SNP 4. Pada Standar Isi, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Standar Sarana dan Prasarana capaian mutunya menuju SNP 3. Capaian SNP tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi Bali Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) disajikan dalam grafik 4.5 berikut.



Grafik 4.5 Capaian SNP Tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi Bali Tahun 2017

Gambaran tentang jumlah sekolah terhadap capaian SNP jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di Provinsi Bali digambarkan dalam grafik 4.6 berikut.



Grafik 4.6 Kuantitas Sekolah dengan Capaian SNP

Berdasarkan grafik 4.6 di atas, secara umum capaian SNP sekolah ada pada capaian mutu menuju SNP 4 yaitu sebanyak 113 sekolah. Capaian mutu menuju SNP 3 sebanyak 24 sekolah. Capaian mutu menuju SNP 2 sebanyak 5 sekolah dan capaian mutu menuju SNP 1 sebanyak 12 sekolah. Berdasarkan grafik tersebut, belum ada Sekolah yang mencapai SNP.

Tabel. 4.8 Skor Peta Capaian SNP Provinsi Bali per Kabupaten/Kota

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Capaian SNP	Predikat
PROVINSI	5.18	Menuju SNP 4
BADUNG	4.92	Menuju SNP 3
BANGLI	5.19	Menuju SNP 4
BULELENG	5.13	Menuju SNP 4
GIANYAR	5.24	Menuju SNP 4
JEMBRANA	5.53	Menuju SNP 4
KARANGASEM	5.19	Menuju SNP 4
KLUNGKUNG	5.12	Menuju SNP 4
TABANAN	5.03	Menuju SNP 3
DENPASAR	5.25	Menuju SNP 4

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa rata-rata capaian SNP setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali secara umum ada pada rentang 3,71 – 6,66 atau ada pada capaian menuju SNP 3 dan capaian

mutu menuju SNP 4. Rata-rata capaian SNP di Kabupaten Bangli, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karangasem dan Kota Denpasar capaian mutunya melampaui rata-rata capaian SNP di Provinsi Bali. Sedangkan Kabupaten Badung, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Tabanan masih berada di bawah rata-rata Capaian SNP Provinsi Bali. Capaian SNP Kabupaten Badung paling rendah di antara capaian SNP Kabupaten yang lain.

2. Capaian SNP untuk Setiap Standar

Capaian SNP untuk setiap standar jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di Provinsi Bali untuk setiap kabupaten/kota disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.9 Capaian SNP kabupaten/Kota untuk setiap standar

STANDAR	WILAYAH								
	BLLNG	JMBRN	TAB	BADUNG	GIANYAR	KLK	BANGLI	K.ASEM	DPS
SKL	5,44	5,83	5,37	5,17	5,54	5,81	5,90	5,49	5,93
ISI	4,69	5,37	4,60	4,63	5,15	4,89	5,18	5,00	5,08
PROSES	5,79	6,40	5,75	5,53	6,07	5,92	6,34	5,74	6,23
PENILAIAN	5,48	5,82	5,54	6,12	6,18	5,15	5,75	6,02	6,00
PTK	4,76	4,57	4,46	4,61	4,57	4,66	4,08	4,35	4,16
SARPRAS	4,34	4,63	4,19	4,04	3,90	3,83	3,72	4,26	4,22
PENGELOLAAN	5,18	5,76	5,00	4,78	5,35	5,32	5,43	5,20	5,60
PEMBIAYAAN	5,38	5,88	5,29	4,47	5,13	5,40	5,11	5,46	4,78

Dari tabel 4.9 di atas, secara umum capaian mutu Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, Standar Penilaian, dan Standar Pengelolaan untuk setiap kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali ada pada capaian mutu menuju SNP 4. Capaian Standar Isi, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) dan Standar Sarana dan Prasarana (Sarpras) secara umum ada pada capaian mutu menuju SNP 3.

D. Capaian SNP Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Bali

1. Gambaran Umum Capaian SNP

Capaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) Provinsi Bali untuk jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun 2017 melalui

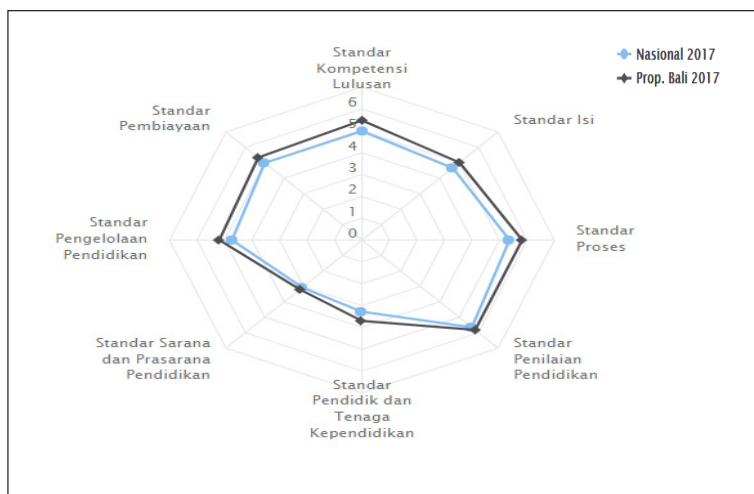
pemetaan mutu pendidikan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.10 Skor Peta Capaian SNP Setiap Standar Tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi Bali Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun 2017

JENJANG SMK	NASIONAL	PROV.BALI
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	4.99	5.48
STANDAR ISI	4.67	5.02
STANDAR PROSES	5.37	5.84
STANDAR PENILAIAN	5.65	5.82
STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	3.28	3.70
STANDAR SARANA DAN PRASARANA	3.07	3.21
STANDAR PENGELOLAAN	4.73	5.19
STANDAR PEMBIAYAAN	5.00	5.35

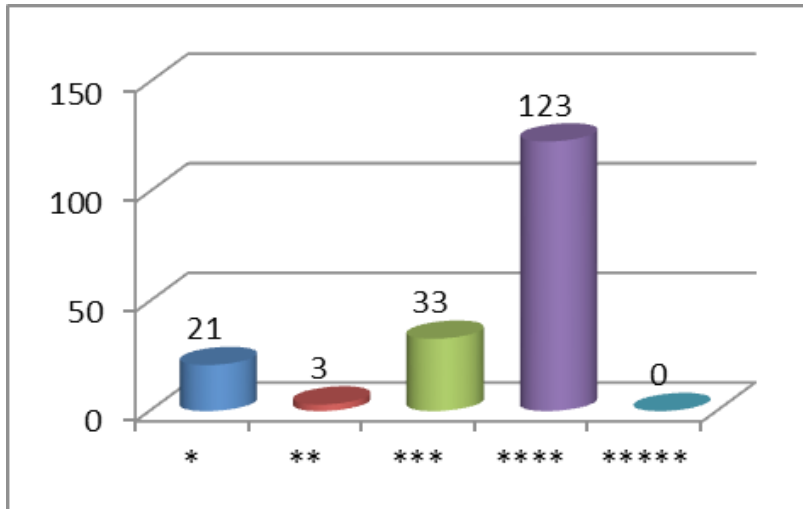
Dari data tabel 4.10 di atas, capaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) masing-masing standar untuk jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Bali lebih tinggi dari capaian SNP masing-masing standar jenjang SMK tingkat Nasional. Namun demikian capaian mutu setiap standar di tingkat Nasional dan tingkat Provinsi Bali belum mencapai SNP. Di Provinsi Bali Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan capaian mutunya menuju SNP 4. Sedangkan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Standar Sarana dan Prasarana capaian mutunya menuju SNP 2.

Capaian SNP tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi Bali Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) disajikan dalam grafik 4.7 berikut.



Grafik 4.7 Capaian SNP Tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi Bali Tahun 2017

Gambaran tentang jumlah sekolah terhadap capaian SNP jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Bali digambarkan dalam grafik 4.8 berikut.



Grafik 4.8 Kuantitas Sekolah dengan Capaian SNP

Berdasarkan grafik 4.8 di atas, secara umum capaian SNP sekolah ada pada capaian mutu menuju SNP 4 yaitu sebanyak 123 sekolah. Capaian mutu menuju SNP 3 sebanyak 33 sekolah. Capaian mutu menuju SNP 2 sebanyak 3 sekolah. Capaian mutu menuju SNP 1 sebanyak 21 sekolah. Berdasarkan grafik tersebut, belum ada Sekolah yang mencapai SNP.

Tabel 4.11 Skor Peta Capaian SNP Provinsi Bali per Kabupaten/Kota

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Capaian SNP	Predikat
PROVINSI	4.99	Menuju SNP 3
BADUNG	5.00	Menuju SNP 4
BANGLI	5.26	Menuju SNP 4
BULELENG	4.74	Menuju SNP 3
GIANYAR	4.41	Menuju SNP 3
JEMBRANA	5.66	Menuju SNP 4
KARANGASEM	4.94	Menuju SNP 3
KLUNGKUNG	4.81	Menuju SNP 3
TABANAN	4.65	Menuju SNP 3
DENPASAR	5.45	Menuju SNP 4

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa rata-rata capaian SNP setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali secara umum ada pada rentang 3,71 – 6,66 atau ada pada capaian menuju SNP 3 dan capaian mutu menuju SNP 4. Rata-rata capaian SNP di Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Jembrana, dan Kota Denpasar capaian mutunya melampaui rata-rata capaian SNP di Provinsi Bali. Sedangkan Kabupaten Buleleng, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Tabanan masih berada di bawah rata-rata Capaian mutu SNP Provinsi Bali. Capaian SNP Kabupaten Gianyar paling rendah di antara capaian SNP Kabupaten yang lain.

2. Capaian SNP untuk Setiap Standar

Capaian SNP untuk setiap standar jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Bali untuk setiap kabupaten/kota disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.12 Capaian SNP Kabupaten/Kota untuk setiap standar

STANDAR	WILAYAH								
	BLLNG	JMBRN	TAB	BADUNG	GIANYAR	KLK	BANGLI	K.ASEM	DPS
SKL	5,32	6,28	5,19	5,48	4,52	5,31	6,01	5,62	6,18
ISI	4,68	5,72	4,56	4,95	4,54	4,66	5,31	4,87	5,86
PROSES	5,63	6,71	5,46	5,80	4,95	5,71	6,43	5,80	6,57
PENILAIAN	5,75	6,15	5,50	5,73	5,96	5,69	5,74	5,52	6,04
PTK	3,28	5,01	3,39	3,87	3,29	4,06	3,86	3,82	3,93
SARPRAS	3,17	3,54	3,15	3,45	2,82	2,94	3,23	3,15	3,42
PENGELOLAAN	4,92	6,13	4,78	5,25	4,30	4,83	5,66	5,23	5,99
PEMBIAYAAN	5,17	5,71	5,18	5,44	4,86	5,24	5,81	5,50	5,63

Dari tabel 4.12 di atas, capaian mutu Standar Proses dan Standar Penilaian, untuk setiap kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali ada pada capaian mutu menuju SNP 4. Capaian mutu pada Standar Proses di Kabupaten Jembrana telah mencapai SNP. Sedangkan Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) dan Standar Sarana dan Prasarana (Sarpras) secara umum ada pada capaian mutu menuju SNP 3.

E. Capaian SNP untuk Setiap Indikator

Capaian SNP semua jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK di masing-masing kabupaten/kota dan Provinsi Bali pada setiap indikator disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.13 Capaian SNP Setiap Indikator Kabupaten Buleleng Tahun 2017

Standar	Kode Indikator	Indikator	Skor Mutu			
			SD	SMP	SMA	SMK
1 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	1.1	Lulusan Memiliki Kompetensi pada dimensi sikap	6.89	6.84	6.66	6.93
	1.2	Lulusan Memiliki Kompetensi pada dimensi Pengetahuan	3.98	3.03	2.94	3.10
	1.3	Lulusan Memiliki Kompetensi pada dimensi Keterampilan	6.31	6.50	6.27	6.70
2 STANDAR ISI	2.1	Perangkat Pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan	5.89	5.12	4.32	4.75
	2.2	KTSP dikembangkan sesuai prosedur	5.63	5.48	4.90	5.57
	2.3	Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	5.56	5.90	5.41	5.15
3 STANDAR PROSES	3.1	Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan	6.75	6.65	6.41	6.73
	3.2	Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat	6.61	6.30	6.01	5.83
	3.3	Pengawasan dilakukan dalam proses pembelajaran	6.30	6.04	5.67	6.10
4 STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN	4.1	Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi	6.28	6.34	6.18	6.43
	4.2	Teknik Penilaian obyektif dan akuntebel	5.76	5.43	5.23	5.60
	4.3	Penilaian pendidikan ditindaklanjuti	6.36	6.22	5.75	6.06
	4.4	Instrumen Penilaian Menyesuaikan Aspek	5.63	5.22	5.00	5.32
	4.5	Penilaian dilakukan mengikuti prosedur	5.71	5.34	5.21	5.35

Standar	Kode Indikator	Indikator	Skor Mutu			
			SD	SMP	SMA	SMK
5 STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	5.1	Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan	6.83	6.97	7.35	4.66
	5.2	Ketersediaan dan kompetensi Kepala sekolah sesuai ketentuan	4.83	4.73	4.76	3.58
	5.3	Ketersediaan dan kompetensi Tenaga Kependidikan sesuai ketentuan	3.53	3.59	4.21	3.30
	5.4	Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.5	Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan	0.00	0.00	0.00	0.00
6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA	6.1	Kapasitas dan daya tampung sekolah memadai	4.79	4.63	4.82	3.46
	6.2	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap	1.59	1.98	2.23	1.66
	6.3	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap	2.14	2.18	2.89	2.50
7 STANDAR PENGELOLAAN	7.1	Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan	6.41	6.27	5.96	6.09
	7.2	Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan	6.22	6.09	5.91	6.25
	7.3	Kepala sekolah berkinerja baik	1.95	1.80	1.75	1.72
	7.4	Sekolah mengelola sistem informasi manajemen	6.23	5.97	5.88	6.03
8 STANDAR PEMBIAYAAN	8.1	Sekolah memberikan layanan subsidi silang	6.88	6.80	6.84	6.65
	8.2	Beban operasional sekolah sesuai ketentuan	6.83	6.81	6.61	6.80
	8.3	Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik	4.17	3.79	3.70	3.47

Berdasarkan tabel 4.13, Standar Kompetensi Lulusan di Kabupaten Buleleng masih rendah dalam kompetensi pengetahuannya. Namun, kompetensi pada dimensi sikap sesuai standar. Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) belum optimal sesuai prosedur, Perangkat Pembelajaran belum

optimal sesuai rumusan kompetensi lulusan dan dilaksanakan belum optimal sesuai ketentuan. Satuan pendidikan merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran tepat dan sesuai ketentuan. Satuan pendidikan perlu melakukan peningkatan pengawasan dalam proses pembelajaran. Satuan pendidikan melakukan penilaian mencakup ranah, sikap, pengetahuan dan keterampilan. Namun demikian, Perangkat teknik penilaian yang dimiliki belum lengkap. Satuan pendidikan di Kabupaten Buleleng masih rendah dalam ketersediaan tenaga pustakawan dan laboran. Sarana dan prasarana untuk pembelajaran pendukung masih sangat kurang. Sekolah mulai meningkat melakukan perencanaan pengelolaan, dan beban belajar sekolah telah sesuai dengan ketentuan.

Tabel 4.14 Capaian SNP Setiap Indikator Kabupaten Jembrana Tahun 2017

Standar	Kode Indikator	Indikator	Skor Mutu			
			SD	SMP	SMA	SMK
1 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	1.1	Lulusan Memiliki Kompetensi pada dimensi sikap	6.90	6.93	6.69	6.95
	1.2	Lulusan Memiliki Kompetensi pada dimensi Pengetahuan	4.23	3.50	3.12	3.82
	1.3	Lulusan Memiliki Kompetensi pada dimensi Keterampilan	6.45	6.67	6.33	6.84
2 STANDAR ISI	2.1	Perangkat Pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan	5.91	5.26	4.71	5.33
	2.2	KTSP dikembangkan sesuai prosedur	5.65	5.84	5.70	6.02
	2.3	Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	5.57	6.12	5.71	5.81
3 STANDAR PROSES	3.1	Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan	6.77	6.82	6.39	6.85
	3.2	Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat	6.68	6.79	6.57	6.76
	3.3	Pengawasan dilakukan dalam proses pembelajaran	6.27	6.40	6.24	6.51
4 STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN	4.1	Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi	6.59	6.70	6.23	6.63
	4.2	Teknik Penilaian obyektif dan akuntebel	5.74	6.15	5.70	6.14
	4.3	Penilaian pendidikan ditindaklanjuti	6.39	6.37	6.22	6.22
	4.4	Instrumen Penilaian Menyesuaikan Aspek	5.55	6.04	5.55	5.97
	4.5	Penilaian dilakukan mengikuti prosedur	5.85	5.56	5.41	5.78

Standar	Kode Indikator	Indikator	Skor Mutu			
			SD	SMP	SMA	SMK
5 STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	5.1	Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan	6.81	7.24	7.41	7.59
	5.2	Ketersediaan dan kompetensi Kepala sekolah sesuai ketentuan	4.93	5.35	4.24	5.10
	5.3	Ketersediaan dan kompetensi Tenaga Kependidikan sesuai ketentuan	3.81	4.02	3.95	4.58
	5.4	Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.5	Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan	0.00	0.00	0.00	0.00
6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA	6.1	Kapasitas dan daya tampung sekolah memadai	4.79	4.86	5.05	3.76
	6.2	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap	1.68	2.04	2.36	1.94
	6.3	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap	2.53	2.55	3.51	3.59
7 STANDAR PENGELOLAAN	7.1	Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan	6.41	6.62	6.33	6.68
	7.2	Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan	6.24	6.44	6.04	6.61
	7.3	Kepala sekolah berkinerja baik	1.95	2.03	1.97	2.09
	7.4	Sekolah mengelola sistem informasi manajemen	6.45	6.52	6.17	6.46
8 STANDAR PEMBIAYAAN	8.1	Sekolah memberikan layanan subsidi silang	6.77	6.81	7.00	7.00
	8.2	Beban operasional sekolah sesuai ketentuan	6.87	6.89	6.67	6.60
	8.3	Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik	4.04	4.30	3.98	4.23

Standar Kompetensi Lulusan di Kabupaten Jembrana seperti yang terlihat dalam tabel 4.14 secara umum sudah sangat baik dalam kompetensi dimensi sikap dan baik dalam kompetensi dimensi keterampilan. Namun demikian, kompetensi dimensi pengetahuan masih rendah. Kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dimiliki sekolah sudah mulai dikembangkan sesuai prosedur. Perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat. Namun demikian instrumen penilaian yang dilakukan masih belum sesuai aspek penilaian dan belum mengikuti prosedur

yang berlaku. Ketersediaan tenaga administrasi sekolah masih kurang terutama untuk tenaga pustakawan dan laboran. Sarana prasarana pembelajaran dan pendukung belum lengkap. Sekolah melakukan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sekolah telah mulai dilakukan sesuai prosedur. Beban operasional sekolah dalam hal biaya operasional non personil telah sesuai dengan ketentuan.

Tabel 4.15 Capaian SNP Setiap Indikator Kabupaten Tabanan Tahun 2017

Standar	Kode Indikator	Indikator	Skor Mutu			
			SD	SMP	SMA	SMK
1 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	1.1	Lulusan Memiliki Kompetensi pada dimensi sikap	6.95	6.75	6.60	6.60
	1.2	Lulusan Memiliki Kompetensi pada dimensi Pengetahuan	4.80	3.31	2.97	3.11
	1.3	Lulusan Memiliki Kompetensi pada dimensi Keterampilan	6.74	6.61	6.26	6.45
2 STANDAR ISI	2.1	Perangkat Pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan	6.37	5.52	4.01	4.49
	2.2	KTSP dikembangkan sesuai prosedur	5.99	5.69	5.07	5.37
	2.3	Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	5.58	6.03	5.36	5.06
3 STANDAR PROSES	3.1	Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan	6.84	6.70	6.34	6.40
	3.2	Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat	6.80	6.59	6.06	5.73
	3.3	Pengawasan dilakukan dalam proses pembelajaran	6.61	6.33	5.71	5.76
4 STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN	4.1	Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi	6.66	6.53	6.34	6.29
	4.2	Teknik Penilaian obyektif dan akuntebel	6.15	5.95	5.21	5.15
	4.3	Penilaian pendidikan ditindaklanjuti	6.48	6.34	6.02	5.80
	4.4	Instrumen Penilaian Menyesuaikan Aspek	5.94	5.79	4.98	4.90
	4.5	Penilaian dilakukan mengikuti prosedur	5.98	5.61	5.13	5.35

Standar	Kode Indikator	Indikator	Skor Mutu			
			SD	SMP	SMA	SMK
5 STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	5.1	Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan	6.69	7.08	7.03	4.93
	5.2	Ketersediaan dan kompetensi Kepala sekolah sesuai ketentuan	4.86	4.95	4.25	3.38
	5.3	Ketersediaan dan kompetensi Tenaga Kependidikan sesuai ketentuan	4.11	3.74	4.12	3.85
	5.4	Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.5	Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan	0.00	0.00	0.00	0.00
6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA	6.1	Kapasitas dan daya tampung sekolah memadai	4.77	4.77	4.66	3.43
	6.2	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap	1.79	2.06	2.17	1.77
	6.3	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap	2.39	2.12	2.64	2.57
7 STANDAR PENGELOLAAN	7.1	Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan	6.68	6.61	5.85	5.90
	7.2	Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan	6.57	6.18	5.83	5.96
	7.3	Kepala sekolah berkinerja baik	2.06	1.94	1.71	1.71
	7.4	Sekolah mengelola sistem informasi manajemen	6.69	6.52	5.63	5.68
8 STANDAR PEMBIAYAAN	8.1	Sekolah memberikan layanan subsidi silang	5.95	7.00	6.64	7.00
	8.2	Beban operasional sekolah sesuai ketentuan	6.77	6.83	6.71	6.83
	8.3	Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik	4.23	4.26	3.48	3.43

Berdasarkan tabel 4.15, Standar Kompetensi Lulusan di Kabupaten Tabanan secara umum sudah sangat baik dalam kompetensi dimensi sikap dan baik dalam kompetensi dimensi keterampilan. Namun demikian, kompetensi dimensi pengetahuan masih rendah. Perangkat pembelajaran yang tertuang dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) buku 3 yang dimiliki sekolah sesuai dengan standar lulusan. Sekolah perlu lebih optimal dalam pengembangan

dan pelaksanaan kurikulum. Perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat. Namun demikian instrumen penilaian yang dilakukan masih belum sesuai aspek penilaian dan belum mengikuti prosedur yang berlaku. Tenaga administrasi sekolah di Kabupaten Tabanan masih kurang terutama untuk tenaga pustakawan dan laboran. Sarana prasarana pembelajaran dan pendukung belum lengkap. Sekolah melakukan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sekolah dilakukan sesuai prosedur. Beban operasional sekolah dalam hal biaya operasional non personil telah sesuai dengan ketentuan

Tabel 4.16 Capaian SNP Setiap Indikator Kabupaten Badung Tahun 2017

Standar	Kode Indikator	Indikator	Skor Mutu			
			SD	SMP	SMA	SMK
1 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	1.1	Lulusan Memiliki Kompetensi pada dimensi sikap	6.95	6.95	6.81	6.72
	1.2	Lulusan Memiliki Kompetensi pada dimensi Pengetahuan	4.80	3.20	3.02	3.18
	1.3	Lulusan Memiliki Kompetensi pada dimensi Keterampilan	6.74	6.70	6.62	6.45
2 STANDAR ISI	2.1	Perangkat Pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan	6.37	5.28	5.09	4.59
	2.2	KTSP dikembangkan sesuai prosedur	5.99	5.76	5.45	5.69
	2.3	Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	5.58	6.05	4.92	5.39
3 STANDAR PROSES	3.1	Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan	6.84	6.65	6.65	6.46
	3.2	Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat	6.80	6.42	5.61	6.01
	3.3	Pengawasan dilakukan dalam proses pembelajaran	6.61	6.18	6.25	5.93
4 STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN	4.1	Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi	6.66	6.62	6.56	6.31
	4.2	Teknik Penilaian obyektif dan akuntebel	6.15	5.88	6.12	5.49
	4.3	Penilaian pendidikan ditindaklanjuti	6.48	6.34	6.35	6.21
	4.4	Instrumen Penilaian Menyesuaikan Aspek	5.94	5.68	5.98	5.28
	4.5	Penilaian dilakukan mengikuti prosedur	5.98	5.61	5.61	5.34

Standar	Kode Indikator	Indikator	Skor Mutu			
			SD	SMP	SMA	SMK
5 STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	5.1	Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan	6.69	6.62	7.01	6.26
	5.2	Ketersediaan dan kompetensi Kepala sekolah sesuai ketentuan	4.86	4.06	4.65	3.38
	5.3	Ketersediaan dan kompetensi Tenaga Kependidikan sesuai ketentuan	4.11	3.94	4.23	4.48
	5.4	Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.5	Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan	0.00	0.00	0.00	0.00
6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA	6.1	Kapasitas dan daya tampung sekolah memadai	4.77	4.86	4.45	3.72
	6.2	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap	1.79	2.04	2.27	1.66
	6.3	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap	2.39	2.61	2.85	3.00
7 STANDAR PENGELOLAAN	7.1	Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan	6.68	6.58	6.18	6.11
	7.2	Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan	6.57	6.40	6.02	6.18
	7.3	Kepala sekolah berkinerja baik	2.06	1.91	1.61	1.83
	7.4	Sekolah mengelola sistem informasi manajemen	6.69	6.51	5.89	6.07
8 STANDAR PEMBIAYAAN	8.1	Sekolah memberikan layanan subsidi silang	5.95	5.79	5.63	6.44
	8.2	Beban operasional sekolah sesuai ketentuan	6.77	6.60	6.26	6.69
	8.3	Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik	4.23	4.26	3.31	3.71

Standar Kompetensi Lulusan di Kabupaten Badung secara umum sudah sangat baik dalam kompetensi dimensi sikap dan baik dalam kompetensi dimensi keterampilan. Namun demikian, kompetensi dimensi pengetahuan masih rendah. Perangkat pembelajaran yang tertuang dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) buku 3 yang dimiliki sekolah sesuai dengan standar lulusan. Sekolah perlu lebih optimal dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum.

Perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat. Pengawas dan kepala sekolah melakukan proses pengawasan proses pembelajaran mulai optimal. Instrumen penilaian yang dilakukan masih belum sesuai aspek penilaian dan belum mengikuti prosedur yang berlaku. Tenaga administrasi sekolah di Kabupaten Badung masih kurang terutama untuk tenaga pustakawan dan laboran. Disamping itu kompetensi yang dimiliki tenaga kependidikan masih belum sesuai dengan ketentuan. Kapasitas dan daya tampung yang dimiliki sekolah belum memadai. Sarana prasarana pembelajaran dan pendukung belum lengkap. Sekolah melakukan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sekolah dilakukan sesuai prosedur. Beban operasional sekolah dalam hal biaya operasional non personil telah sesuai dengan ketentuan. Pengelolaan dana sekolah belum dilakukan secara baik.

Tabel 4.17 Capaian SNP Setiap Indikator Kabupaten Gianyar Tahun 2017

Standar	Kode Indikator	Indikator	Skor Mutu			
			SD	SMP	SMA	SMK
1 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	1.1	Lulusan Memiliki Kompetensi pada dimensi sikap	6.91	6.96	6.79	6.49
	1.2	Lulusan Memiliki Kompetensi pada dimensi Pengetahuan	3.92	3.07	3.11	2.38
	1.3	Lulusan Memiliki Kompetensi pada dimensi Keterampilan	6.45	6.71	6.62	6.42
2 STANDAR ISI	2.1	Perangkat Pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan	5.77	5.72	5.48	5.63
	2.2	KTSP dikembangkan sesuai prosedur	5.54	5.92	5.75	5.69
	2.3	Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	5.44	5.80	5.15	4.93
3 STANDAR PROSES	3.1	Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan	6.77	6.80	6.69	6.42
	3.2	Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat	6.47	5.86	6.12	5.25
	3.3	Pengawasan dilakukan dalam proses pembelajaran	6.30	6.48	6.51	6.11

Standar	Kode Indikator	Indikator	Skor Mutu			
			SD	SMP	SMA	SMK
4 STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN	4.1	Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi	6.39	6.66	6.60	6.35
	4.2	Teknik Penilaian obyektif dan akuntebel	5.85	6.13	6.22	6.00
	4.3	Penilaian pendidikan ditindaklanjuti	6.38	6.52	6.25	6.12
	4.4	Instrumen Penilaian Menyesuaikan Aspek	5.70	5.96	6.21	5.92
	4.5	Penilaian dilakukan mengikuti prosedur	5.80	5.76	5.62	5.43
5 STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	5.1	Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan	6.66	6.88	7.10	5.29
	5.2	Ketersediaan dan kompetensi Kepala sekolah sesuai ketentuan	4.05	4.21	4.59	2.71
	5.3	Ketersediaan dan kompetensi Tenaga Kependidikan sesuai ketentuan	2.20	3.79	3.86	4.33
	5.4	Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.5	Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan	0.00	0.00	0.00	0.00
6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA	6.1	Kapasitas dan daya tampung sekolah memadai	4.53	4.49	4.30	3.07
	6.2	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap	1.65	1.97	2.31	1.57
	6.3	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap	2.14	2.23	2.73	2.13
7 STANDAR PENGELOLAAN	7.1	Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan	6.34	6.57	6.24	6.14
	7.2	Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan	6.21	6.38	6.23	5.85
	7.3	Kepala sekolah berkinerja baik	1.89	1.74	1.84	1.50
	7.4	Sekolah mengelola sistem informasi manajemen	6.18	6.39	6.32	5.82
8 STANDAR PEMBIAYAAN	8.1	Sekolah memberikan layanan subsidi silang	6.82	6.67	6.30	6.50
	8.2	Beban operasional sekolah sesuai ketentuan	6.83	6.87	6.84	6.69
	8.3	Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik	3.79	3.52	3.87	3.17

Sesuai dengan tabel 4.17, Standar Kompetensi Lulusan di Kabupaten Gianyar secara umum sudah sangat baik dalam kompetensi dimensi sikap dan baik dalam kompetensi dimensi keterampilan. Namun demikian, kompetensi dimensi pengetahuan masih rendah. Pengembangan dan pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) belum optimal sesuai prosedur. Perangkat pembelajaran yang tertuang dalam buku 3 belum optimal sesuai dengan rumusan kompetensi lulusan. Perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran telah sesuai ketentuan. Kepala sekolah dan pengawas melakukan pengawasan dalam proses pembelajaran. Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi dan sudah mulai dilakukan tindak lanjut terhadap hasil penilaian. Namun demikian instrumen penilaian yang dilakukan masih belum sesuai aspek penilaian dan belum mengikuti prosedur yang berlaku. Ketersediaan dan kompetensi administrasi sekolah di Kabupaten Gianyar masih kurang terutama untuk pustakawan dan laboran. Kapasitas dan daya tampung sekolah belum memadai. Sarana prasarana pembelajaran dan pendukung belum lengkap. Sekolah melakukan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sekolah sesuai prosedur. Beban operasional sekolah dalam hal biaya operasional non personil telah sesuai dengan ketentuan

Tabel 4.18 Capaian SNP Setiap Indikator Kabupaten Klungkung Tahun 2017

Standar	Kode Indikator	Indikator	Skor Mutu			
			SD	SMP	SMA	SMK
1 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	1.1	Lulusan Memiliki Kompetensi pada dimensi sikap	6.89	6.15	6.64	6.81
	1.2	Lulusan Memiliki Kompetensi pada dimensi Pengetahuan	4.12	3.44	3.16	2.87
	1.3	Lulusan Memiliki Kompetensi pada dimensi Keterampilan	6.42	6.95	6.30	6.71
2 STANDAR ISI	2.1	Perangkat Pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan	5.84	5.43	4.27	4.78
	2.2	KTSP dikembangkan sesuai prosedur	5.78	5.94	4.89	5.48
	2.3	Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	5.54	5.95	5.50	4.99
3 STANDAR PROSES	3.1	Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan	6.72	6.83	6.09	6.71
	3.2	Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat	6.57	6.71	6.45	5.97
	3.3	Pengawasan dilakukan dalam proses pembelajaran	6.31	6.56	5.21	6.05

Standar	Kode Indikator	Indikator	Skor Mutu			
			SD	SMP	SMA	SMK
4 STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN	4.1	Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi	6.42	6.75	5.91	6.46
	4.2	Teknik Penilaian obyektif dan akuntebel	5.80	6.22	4.75	5.33
	4.3	Penilaian pendidikan ditindaklanjuti	6.33	6.43	5.50	6.00
	4.4	Instrumen Penilaian Menyesuaikan Aspek	5.61	6.14	4.46	5.16
	4.5	Penilaian dilakukan mengikuti prosedur	5.78	5.73	5.14	5.49
5 STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	5.1	Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan	6.60	6.47	7.58	5.83
	5.2	Ketersediaan dan kompetensi Kepala sekolah sesuai ketentuan	4.74	4.25	4.23	4.12
	5.3	Ketersediaan dan kompetensi Tenaga Kependidikan sesuai ketentuan	2.87	3.36	4.22	4.59
	5.4	Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.5	Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan	0.00	0.00	0.00	0.00
6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA	6.1	Kapasitas dan daya tampung sekolah memadai	4.62	4.40	4.24	3.21
	6.2	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap	1.69	2.03	2.09	1.67
	6.3	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap	2.12	2.15	2.68	2.28
7 STANDAR PENGELOLAAN	7.1	Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan	6.42	6.75	5.77	5.67
	7.2	Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan	6.28	6.50	5.81	6.16
	7.3	Kepala sekolah berkinerja baik	1.93	2.02	1.87	1.66
	7.4	Sekolah mengelola sistem informasi manajemen	6.15	6.67	5.52	5.96
8 STANDAR PEMBIAYAAN	8.1	Sekolah memberikan layanan subsidi silang	6.82	7.00	7.00	7.00
	8.2	Beban operasional sekolah sesuai ketentuan	6.89	6.76	6.77	6.83
	8.3	Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik	4.08	4.24	3.69	3.61

Capaian Standar Kompetensi Lulusan di Kabupaten Klungkung sesuai tabel 4.18 secara umum sudah sangat baik dalam kompetensi

dimensi sikap dan baik dalam kompetensi dimensi keterampilan. Namun demikian, kompetensi dimensi pengetahuan masih rendah. Pengembangan dan pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) belum optimal sesuai prosedur. Perangkat pembelajaran yang tertuang dalam buku 3 belum optimal sesuai dengan rumusan kompetensi lulusan. Perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran telah sesuai ketentuan. Kepala sekolah dan pengawas melakukan pengawasan dalam proses pembelajaran. Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi dan sudah mulai dilakukan tindak lanjut terhadap hasil penilaian. Namun demikian teknik penilaian belum obyektif dan akuntabel. Instrumen penilaian yang dilakukan masih belum sesuai aspek penilaian dan belum mengikuti prosedur yang berlaku. Ketersediaan dan kompetensi administrasi sekolah di Kabupaten Klungkung masih kurang terutama untuk pustakawan dan laboran. Kapasitas dan daya tampung sekolah belum memadai. Sarana prasarana pembelajaran dan pendukung belum lengkap. Sekolah melakukan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sekolah sesuai prosedur. Beban operasional sekolah dalam hal biaya operasional non personil telah sesuai dengan ketentuan

Tabel 4.19 Capaian SNP Setiap Indikator Kabupaten Bangli Tahun 2017

Standar	Kode Indikator	Indikator	Skor Mutu			
			SD	SMP	SMA	SMK
1 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	1.1	Lulusan Memiliki Kompetensi pada dimensi sikap	6.94	6.98	6.60	6.79
	1.2	Lulusan Memiliki Kompetensi pada dimensi Pengetahuan	4.20	3.64	3.30	3.26
	1.3	Lulusan Memiliki Kompetensi pada dimensi Keterampilan	6.41	6.78	6.50	6.60
2 STANDAR ISI	2.1	Perangkat Pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan	5.94	5.51	4.92	4.73
	2.2	KTSP dikembangkan sesuai prosedur	5.71	5.85	5.56	5.72
	2.3	Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	5.63	6.27	5.05	5.48
3 STANDAR PROSES	3.1	Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan	6.79	6.85	6.49	6.57
	3.2	Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat	6.64	6.79	6.42	6.60
	3.3	Pengawasan dilakukan dalam proses pembelajaran	6.38	6.52	6.10	6.13

Standar	Kode Indikator	Indikator	Skor Mutu			
			SD	SMP	SMA	SMK
4 STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN	4.1	Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi	6.49	6.40	6.40	6.42
	4.2	Teknik Penilaian obyektif dan akuntebel	6.02	5.88	5.67	5.53
	4.3	Penilaian pendidikan ditindaklanjuti	6.36	6.30	5.75	6.09
	4.4	Instrumen Penilaian Menyesuaikan Aspek	5.91	5.76	5.64	5.39
	4.5	Penilaian dilakukan mengikuti prosedur	5.83	5.52	5.30	5.27
5 STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	5.1	Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan	6.76	6.87	5.59	5.90
	5.2	Ketersediaan dan kompetensi Kepala sekolah sesuai ketentuan	4.73	4.69	4.50	3.66
	5.3	Ketersediaan dan kompetensi Tenaga Kependidikan sesuai ketentuan	3.47	3.73	4.43	4.09
	5.4	Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.5	Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan	0.00	0.00	0.00	0.00
6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA	6.1	Kapasitas dan daya tampung sekolah memadai	4.78	4.82	4.14	3.57
	6.2	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap	1.75	2.09	2.38	1.56
	6.3	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap	2.08	2.31	2.48	2.32
7 STANDAR PENGELOLAAN	7.1	Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan	6.47	6.66	6.07	6.34
	7.2	Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan	6.33	6.49	5.94	6.11
	7.3	Kepala sekolah berkinerja baik	1.97	2.06	1.91	1.96
	7.4	Sekolah mengelola sistem informasi manajemen	6.38	6.53	5.44	5.75
8 STANDAR PEMBIAYAAN	8.1	Sekolah memberikan layanan subsidi silang	6.77	7.00	7.00	7.00
	8.2	Beban operasional sekolah sesuai ketentuan	6.92	6.60	6.69	6.89
	8.3	Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik	4.12	4.14	3.98	4.07

Berdasarkan tabel 4.19, Capaian Standar Kompetensi Lulusan di Kabupaten Bangli secara umum sudah sangat baik dalam kompetensi dimensi sikap dan baik dalam kompetensi dimensi keterampilan. Namun demikian, kompetensi dimensi pengetahuan masih rendah. Pengembangan dan pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) belum optimal sesuai prosedur. Perangkat pembelajaran yang tertuang dalam buku 3 belum optimal sesuai dengan rumusan kompetensi lulusan. Perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran telah sesuai ketentuan. Kepala sekolah dan pengawas melakukan pengawasan dalam proses pembelajaran. Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi dan dilakukan tindak lanjut terhadap hasil penilaian. Namun demikian, instrumen penilaian yang dilakukan masih belum optimal sesuai aspek penilaian dan belum optimal mengikuti prosedur yang berlaku. Ketersediaan dan kompetensi administrasi sekolah di Kabupaten Bangli masih kurang terutama untuk pustakawan dan laboran. Kapasitas dan daya tampung sekolah belum memadai. Sarana prasarana pembelajaran dan pendukung belum lengkap. Sekolah melakukan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sekolah sesuai prosedur. Beban operasional sekolah dalam hal biaya operasional non personil telah sesuai dengan ketentuan

Tabel 4.20 Capaian SNP Setiap Indikator Kabupaten Karangasem Tahun 2017

Standar	Kode Indikator	Indikator	Skor Mutu			
			SD	SMP	SMA	SMK
1 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	1.1	Lulusan Memiliki Kompetensi pada dimensi sikap	6.88	6.87	6.92	6.95
	1.2	Lulusan Memiliki Kompetensi pada dimensi Pengetahuan	3.93	3.10	3.32	3.17
	1.3	Lulusan Memiliki Kompetensi pada dimensi Keterampilan	6.28	6.51	6.66	6.64
2 STANDAR ISI	2.1	Perangkat Pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan	6.02	5.16	4.91	4.69
	2.2	KTSP dikembangkan sesuai prosedur	5.62	5.74	5.68	5.28
	2.3	Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	5.45	5.89	5.60	5.47

Standar	Kode Indikator	Indikator	Skor Mutu			
			SD	SMP	SMA	SMK
3 STANDAR PROSES	3.1	Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan	6.74	6.74	6.59	6.55
	3.2	Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat	6.47	5.98	5.97	6.15
	3.3	Pengawasan dilakukan dalam proses pembelajaran	6.35	6.12	6.07	5.74
4 STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN	4.1	Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi	6.36	6.53	6.60	6.58
	4.2	Teknik Penilaian obyektif dan akuntebel	5.74	5.79	5.78	5.10
	4.3	Penilaian pendidikan ditindaklanjuti	6.41	6.28	6.39	6.02
	4.4	Instrumen Penilaian Menyesuaikan Aspek	5.61	5.64	5.48	4.70
	4.5	Penilaian dilakukan mengikuti prosedur	5.72	5.56	5.84	5.23
5 STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	5.1	Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan	6.84	6.78	6.80	5.38
	5.2	Ketersediaan dan kompetensi Kepala sekolah sesuai ketentuan	4.65	4.27	4.22	3.92
	5.3	Ketersediaan dan kompetensi Tenaga Kependidikan sesuai ketentuan	2.36	3.43	3.94	4.55
	5.4	Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.5	Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan	0.00	0.00	0.00	0.00
6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA	6.1	Kapasitas dan daya tampung sekolah memadai	4.59	4.52	4.69	3.45
	6.2	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap	1.66	1.86	2.20	1.61
	6.3	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap	1.95	2.07	3.06	2.47
7 STANDAR PENGELOLAAN	7.1	Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan	6.45	6.42	6.45	6.11
	7.2	Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan	6.22	6.23	6.25	6.16
	7.3	Kepala sekolah berkinerja baik	1.91	1.79	1.78	1.75
	7.4	Sekolah mengelola sistem informasi manajemen	6.32	6.21	6.13	6.11

Standar	Kode Indikator	Indikator	Skor Mutu			
			SD	SMP	SMA	SMK
8 STANDAR PEMBIAYAAN	8.1	Sekolah memberikan layanan subsidi silang	6.86	7.00	7.00	7.00
	8.2	Beban operasional sekolah sesuai ketentuan	6.85	6.78	6.87	6.99
	8.3	Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik	4.02	3.60	3.66	3.66

Capaian Standar Kompetensi Lulusan di Kabupaten Klungkung sesuai tabel 4.20 secara umum sudah sangat baik dalam kompetensi dimensi sikap dan baik dalam kompetensi dimensi keterampilan. Namun demikian, kompetensi dimensi pengetahuan masih rendah. Pengembangan dan pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) belum optimal sesuai prosedur. Perangkat pembelajaran yang tertuang dalam buku 3 belum optimal sesuai dengan rumusan kompetensi lulusan kecuali jenjang Sekolah Dasar. Perencanaan proses pembelajaran telah sesuai ketentuan. Pelaksanaan proses pembelajaran pada jenjang SD dan SMK telah sesuai ketentuan. Kepala sekolah dan pengawas melakukan pengawasan dalam proses pembelajaran. Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi dan sudah mulai dilakukan tindak lanjut terhadap hasil penilaian. Namun demikian teknik penilaian belum obyektif dan akuntabel. Instrumen penilaian yang dilakukan masih belum sesuai aspek penilaian dan belum mengikuti prosedur yang berlaku. Ketersediaan dan kompetensi administrasi sekolah di Kabupaten Klungkung masih kurang terutama untuk pustakawan dan laboran. Kapasitas dan daya tampung sekolah belum memadai. Sarana prasarana pembelajaran dan pendukung belum lengkap. Sekolah melakukan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sekolah sesuai prosedur. Beban operasional sekolah dalam hal biaya operasional non personil telah sesuai dengan ketentuan

Tabel 4.21 Capaian SNP Setiap Indikator Kota Denpasar Tahun 2017

Standar	Kode Indikator	Indikator	Skor Mutu			
			SD	SMP	SMA	SMK
1 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	1.1	Lulusan Memiliki Kompetensi pada dimensi sikap	6.99	6.88	6.93	6.93
	1.2	Lulusan Memiliki Kompetensi pada dimensi Pengetahuan	4.21	3.57	3.42	3.51
	1.3	Lulusan Memiliki Kompetensi pada dimensi Keterampilan	6.52	6.67	6.73	6.75
2 STANDAR ISI	2.1	Perangkat Pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan	5.82	5.43	4.48	5.58
	2.2	KTSP dikembangkan sesuai prosedur	5.38	5.79	5.72	6.19
	2.3	Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	5.45	6.27	5.43	5.82
3 STANDAR PROSES	3.1	Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan	6.75	6.62	6.49	6.61
	3.2	Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat	6.54	6.69	6.43	6.79
	3.3	Pengawasan dilakukan dalam proses pembelajaran	6.20	6.31	6.29	6.32
4 STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN	4.1	Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi	6.70	6.57	6.64	6.65
	4.2	Teknik Penilaian obyektif dan akuntebel	5.86	6.07	5.92	5.85
	4.3	Penilaian pendidikan ditindaklanjuti	6.34	6.38	6.24	6.36
	4.4	Instrumen Penilaian Menyesuaikan Aspek	5.65	5.95	5.66	5.72
	4.5	Penilaian dilakukan mengikuti prosedur	5.86	5.65	5.52	5.64
5 STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	5.1	Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan	6.82	6.91	6.83	6.89
	5.2	Ketersediaan dan kompetensi Kepala sekolah sesuai ketentuan	4.49	2.70	3.78	2.80
	5.3	Ketersediaan dan kompetensi Tenaga Kependidikan sesuai ketentuan	3.83	3.10	3.59	4.45
	5.4	Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.5	Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan	0.00	0.00	0.00	0.00

Standar	Kode Indikator	Indikator	Skor Mutu			
			SD	SMP	SMA	SMK
6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA	6.1	Kapasitas dan daya tampung sekolah memadai	4.56	4.77	4.62	3.71
	6.2	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap	1.66	2.03	2.34	1.71
	6.3	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap	2.38	2.64	3.13	2.96
7 STANDAR PENGELOLAAN	7.1	Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan	6.23	6.42	6.36	6.37
	7.2	Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan	6.12	6.37	6.23	6.52
	7.3	Kepala sekolah berkinerja baik	1.87	2.05	1.88	2.08
	7.4	Sekolah mengelola sistem informasi manajemen	6.21	6.19	6.20	6.39
8 STANDAR PEMBIAYAAN	8.1	Sekolah memberikan layanan subsidi silang	5.19	5.29	4.06	6.22
	8.2	Beban operasional sekolah sesuai ketentuan	6.66	6.69	6.76	6.90
	8.3	Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik	3.91	4.08	4.12	4.32

Capaian Standar Kompetensi Lulusan di Kota Denpasar sesuai tabel 4.21 secara umum sudah sangat baik dalam kompetensi dimensi sikap dan baik dalam kompetensi dimensi keterampilan. Namun demikian, kompetensi dimensi pengetahuan masih rendah. Pengembangan dan pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) belum optimal sesuai prosedur. Perangkat pembelajaran yang tertuang dalam buku 3 belum optimal sesuai dengan rumusan kompetensi lulusan. Perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran telah sesuai ketentuan. Kepala sekolah dan pengawas melakukan pengawasan dalam proses pembelajaran. Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi dan sudah mulai dilakukan tindak lanjut terhadap hasil penilaian. Namun demikian teknik penilaian belum obyektif dan akuntabel. Instrumen penilaian yang dilakukan masih belum sesuai aspek penilaian dan belum mengikuti prosedur yang berlaku. Ketersediaan dan kompetensi administrasi sekolah di Kota Denpasar masih kurang terutama untuk pustakawan dan laboran. Kapasitas dan daya tampung sekolah belum memadai. Sarana prasarana pembelajaran dan pendukung belum

lengkap. Sekolah melakukan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sekolah sesuai prosedur. Beban operasional sekolah dalam hal biaya operasional non personil telah sesuai dengan ketentuan.

Tabel 4.22 Capaian SNP Setiap Indikator Provinsi Bali Tahun 2017

Standar	Kode Indikator	Indikator	Skor Mutu			
			SD	SMP	SMA	SMK
1 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	1.1	Lulusan Memiliki Kompetensi pada dimensi sikap	6.91	6.89	6.76	6.79
	1.2	Lulusan Memiliki Kompetensi pada dimensi Pengetahuan	4.14	3.27	3.14	3.11
	1.3	Lulusan Memiliki Kompetensi pada dimensi Keterampilan	6.44	6.63	6.48	6.61
2 STANDAR ISI	2.1	Perangkat Pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan	5.94	5.35	4.63	5.04
	2.2	KTSP dikembangkan sesuai prosedur	5.67	5.74	5.37	5.73
	2.3	Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	5.53	6.02	5.37	5.34
3 STANDAR PROSES	3.1	Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan	6.77	6.71	6.46	6.57
	3.2	Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat	6.60	6.41	6.13	6.07
	3.3	Pengawasan dilakukan dalam proses pembelajaran	6.33	6.27	5.99	6.09
4 STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN	4.1	Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi	6.46	6.54	6.39	6.46
	4.2	Teknik Penilaian obyektif dan akuntebel	5.84	5.88	5.62	5.64
	4.3	Penilaian pendidikan ditindaklanjuti	6.38	6.34	6.06	6.14
	4.4	Instrumen Penilaian Menyesuaikan Aspek	5.69	5.73	5.41	5.44
	4.5	Penilaian dilakukan mengikuti prosedur	5.80	5.57	5.42	5.44

Standar	Kode Indikator	Indikator	Skor Mutu			
			SD	SMP	SMA	SMK
5 STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	5.1	Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan	6.73	6.87	7.06	5.78
	5.2	Ketersediaan dan kompetensi Kepala sekolah sesuai ketentuan	4.63	4.26	4.36	3.37
	5.3	Ketersediaan dan kompetensi Tenaga Kependidikan sesuai ketentuan	3.21	3.60	4.03	4.18
	5.4	Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.5	Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan	0.00	0.00	0.00	0.00
6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA	6.1	Kapasitas dan daya tampung sekolah memadai	4.68	4.68	4.62	3.49
	6.2	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap	1.65	2.00	2.26	1.67
	6.3	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap	2.19	2.32	2.93	2.64
7 STANDAR PENGELOLAAN	7.1	Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan	6.43	6.50	6.15	6.18
	7.2	Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan	6.28	6.31	6.04	6.21
	7.3	Kepala sekolah berkinerja baik	1.95	1.90	1.79	1.80
	7.4	Sekolah mengelola sistem informasi manajemen	6.30	6.33	5.96	6.06
8 STANDAR PEMBIAYAAN	8.1	Sekolah memberikan layanan subsidi silang	6.59	6.48	6.21	6.63
	8.2	Beban operasional sekolah sesuai ketentuan	6.83	6.75	6.67	6.80
	8.3	Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik	4.06	3.92	3.74	3.72

1. Skor Mutu SD

Lulusan Sekolah Dasar di Provinsi Bali masih rendah dalam kompetensi pengetahuannya. Namun, kompetensi pada dimensi sikap dan keterampilan sesuai standar. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) disusun belum sesuai prosedur, belum optimal memuat Perangkat Pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan dan dilaksanakan belum optimal sesuai ketentuan. Satuan pendidikan merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran

tepat dan sesuai ketentuan. Satuan pendidikan perlu melakukan peningkatan pengawasan dalam proses pembelajaran. Penilaian yang dilakukan satuan pendidikan, tekniknya belum objektif dan akuntabel dan prosedur penilaian belum mengikuti prosedur. Pendidik yang tersedia di jenjang Sekolah Dasar telah sesuai. Sekolah secara umum masih rendah dalam ketersediaan tenaga kependidikan. Ketersediaan tenaga dan kompetensi pustakawan belum sesuai ketentuan. Sarana dan prasarana pembelajaran dan sarana pendukung lain belum lengkap. Perencanaan, pelaksanaan pengelolaan perlu ditingkatkan sehingga kinerja kepala sekolah akan meningkat. Beban operasional sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun sekolah belum optimal melakukan pengelolaan dana dengan baik.

2. Skor Mutu SMP

Lulusan SMP di Provinsi Bali masih rendah dalam kompetensi pengetahuannya. Namun, kompetensi pada dimensi sikap sesuai standar. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) disusun belum sesuai prosedur, belum optimal memuat Perangkat Pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan dan dilaksanakan mulai optimal sesuai ketentuan. Satuan pendidikan merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran tepat dan sesuai ketentuan. Satuan pendidikan perlu melakukan peningkatan pengawasan dalam proses pembelajaran. Penilaian yang dilakukan satuan pendidikan, tekniknya belum objektif dan akuntabel dan prosedur penilaian belum mengikuti prosedur. Pendidik yang tersedia di jenjang SMP telah sesuai. Sekolah secara umum masih rendah dalam ketersediaan tenaga kependidikan. Ketersediaan tenaga dan kompetensi pustakawan dan laboran belum sesuai ketentuan. Sarana dan prasarana pembelajaran dan sarana pendukung lain belum lengkap. Perencanaan, pelaksanaan pengelolaan perlu ditingkatkan sehingga kinerja kepala sekolah akan meningkat. Beban operasional sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun sekolah belum optimal melakukan pengelolaan dana dengan baik.

3. Skor Mutu SMA

Lulusan Sekolah Menengah Atas di Provinsi Bali masih rendah dalam kompetensi pengetahuannya. Namun, kompetensi pada dimensi sikap sesuai standar. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) disusun belum sesuai prosedur, belum optimal memuat Perangkat Pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan dan dilaksanakan belum optimal sesuai ketentuan. Satuan pendidikan perlu meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran

yang tepat dan sesuai ketentuan. Satuan pendidikan perlu melakukan peningkatan pengawasan dalam proses pembelajaran. Penilaian yang dilakukan satuan pendidikan, tekniknya belum objektif dan akuntabel dan prosedur penilaian belum mengikuti prosedur. Pendidik yang tersedia di jenjang SMA telah sesuai. Sekolah secara umum masih rendah dalam ketersediaan tenaga kependidikan. Ketersediaan tenaga dan kompetensi pustakawan belum sesuai ketentuan. Sarana dan prasarana pembelajaran dan sarana pendukung lain belum lengkap. Perencanaan, pelaksanaan pengelolaan perlu ditingkatkan sehingga kinerja kepala sekolah akan meningkat. Beban operasional sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun sekolah belum optimal melakukan pengelolaan dana dengan baik.

4. Skor Mutu SMK

Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Bali masih rendah dalam kompetensi pengetahuannya. Namun, kompetensi pada dimensi sikap sesuai standar. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) disusun belum sesuai prosedur, belum optimal memuat Perangkat Pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan dan dilaksanakan belum optimal sesuai ketentuan. Satuan pendidikan perlu meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang tepat dan sesuai ketentuan. Satuan pendidikan perlu melakukan peningkatan pengawasan dalam proses pembelajaran. Penilaian yang dilakukan satuan pendidikan, tekniknya belum objektif dan akuntabel dan prosedur penilaian belum mengikuti prosedur. Pendidik yang tersedia di jenjang SMK telah sesuai. Sekolah secara umum masih rendah dalam ketersediaan tenaga kependidikan. Ketersediaan tenaga dan kompetensi pustakawan belum sesuai ketentuan. Sarana dan prasarana pembelajaran dan sarana pendukung lain belum lengkap. Perencanaan, pelaksanaan pengelolaan perlu ditingkatkan sehingga kinerja kepala sekolah akan meningkat. Beban operasional sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun sekolah belum optimal melakukan pengelolaan dana dengan baik.

F. Analisis Kekuatan dan Kelemahan Setiap SNP

Kekuatan dan kelemahan mutu pendidikan yang ada di Provinsi Bali tahun 2017 berdasarkan capaian mutu setiap sub indikator disajikan dalam tabel 4.23 berikut.

Tabel 4.23 Analisis Kekuatan dan Kelemahan SNP di Provinsi Bali tahun 2017

STANDAR	KEKUATAN	KELEMAHAN
SKL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lulusan memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, percaya diri, bertanggung jawab, pembelajar sejati sepanjang hayat, dan sehat jasmani dan rohani. 2. Lulusan memiliki kompetensi lulusan dalam keterampilan berpikir dan bertindak mandiri, dan kolaboratif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi lulusan dalam pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif masih rendah 2. Kompetensi lulusan dalam keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, dan komunikatif rendah
ISI	<ol style="list-style-type: none"> 1. KTSP dikembangkan mengacu pada kerangka dasar penyusunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat Pembelajaran belum memuat karakteristik Kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 2. Perangkat pembelajaran belum menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran dan menyesuaikan tingkat kompetensi siswa. 3. Pemangku kepentingan kurang dilibatkan dalam pengembangan KTSP. 4. Masih ada sekolah yang mengembangkan KTSP tidak melewati tahap operasional pengembangan 5. Belum semua sekolah memiliki perangkat KTSP yang dikembangkan sesuai prosedur 6. Penyediaan alokasi waktu pembelajaran belum sesuai kurikulum yang berlaku 7. Sekolah dalam mengatur beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi masih rendah 8. Penyelenggaraan aspek kurikulum pada muatan lokal masih perlu ditingkatkan.

STANDAR	KEKUATAN	KELEMAHAN
<p>PROSES</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. RPP yang disusun mengacu pada silabus yang dikembangkan, dan telah mengarah pada pencapaian kompetensi 2. Rombongan belajar telah sesuai ketentuan. 3. Pengelolaan kelas sebelum memulai pembelajaran sudah tepat. 4. Proses pembelajaran mendorong siswa mencari tahu, mengarahkan pada pendekatan ilmiah, berbasis kompetensi, memberikan pembelajaran terpadu, 5. Melaksanakan pembelajaran dengan jawaban kebenarannya multi 6. Mengutamakan pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat 7. Menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas 8. Mengakui atas perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. RPP yang disusun ada yang belum lengkap dan sistematis 2. RPP yang disusun belum optimal mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah. 3. Proses pembelajaran belum optimal melaksanakan pembelajaran menuju pada keterampilan aplikatif 4. Penerapan metode pembelajaran sesuai karakteristik siswa, penggunaan aneka sumber belajar, dan pemanfaatan media pembelajaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran belum optimal 5. Penilaian otentik secara komprehensif, pemanfaatan hasil penilaian otentik, pemantauan proses pembelajaran, supervisi proses pembelajaran kepada guru dan evaluasi proses pembelajaran belum optimal
<p>PENILAIAN PENDIDIKAN</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek penilaian kurang sesuai ranah kompetensi 2. Teknik penilaian masih kurang objektif dan akuntabel, 3. Penilaian kurang ditindaklanjuti, 4. Instrumen penilaian kurang sesuai aspek, 5. Penilaian kurang mengikuti prosedur.

STANDAR	KEKUATAN	KELEMAHAN
PTK		<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada guru yang belum berkualifikasi S1/D4 2. Rasio guru kelas terhadap rombongan belajar belum seimbang 3. Kompetensi pedagogik dan profesional guru perlu ditingkatkan, 4. Tenaga pelaksana urusan administrasi masih perlu ditambah 5. Ketersediaan dan kompetensi laboran dan pustakawan belum sesuai ketentuan
SARPRAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas rombel sesuai dan memadai 2. Kondisi lahan sekolah memenuhi persyaratan. 3. Kondisi ruang sirkulasi layak pakai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi bangunan sekolah masih ada yang belum memenuhi persyaratan 2. Sarana dan prasarana pembelajaran belum lengkap 3. Sarana dan prasarana pendukung belum lengkap seperti kantin dan tempat parkir 4. Ketersediaan Unit kewirausahaan dan bursa kerja belum optimal 5. Kondisi UKS, jamban belum optimal
PENGELOLAAN		<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekolah kurang optimal melakukan perencanaan pengelolaan 2. Pedoman pengelolaan yang dimiliki sekolah belum lengkap 3. Sistem informasi manajemen belum sesuai ketentuan
PEMBIAYAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekolah telah melakukan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu 2. Biaya operasional dan non personil sesuai ketentuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan pengelolaan dana masih kurang, 2. Laporan belum dapat diakses oleh pemangku kepentingan

G. Masalah dan Akar Permasalahan

Kedelapan standar yang ada membentuk rangkaian input, proses, dan output. Standar kompetensi lulusan merupakan output dalam rangkaian tersebut dan akan terpenuhi apabila input terpenuhi sepenuhnya dan proses berjalan dengan baik. Standar yang menjadi

input dan proses dideskripsikan dalam bentuk hubungan sebab-akibat dengan output.

Berdasarkan kekuatan dan kelemahan pada output (Standar Kompetensi Lulusan), permasalahannya adalah Lulusan Memiliki Kompetensi yang rendah pada dimensi Pengetahuan

Akar permasalahan dari rendahnya kompetensi lulusan pada dimensi pengetahuan dideskripsikan sebagai berikut.

a. Standar isi

- ❖ Kompetensi guru dalam penyusunan perangkat pembelajaran kurang.
- ❖ Pemahaman guru terkait kompetensi sikap siswa belum menyeluruh.
- ❖ Visi, misi dan tujuan sekolah tidak fokus pada pencapaian kompetensi sikap.
- ❖ Sekolah belum memperhatikan perkembangan psikologis anak, lingkup dan kedalaman materi, kesinambungan, fungsi sekolah dan lingkungan siswa.
- ❖ Komitmen sekolah rendah dalam melibatkan pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum sekolah.
- ❖ Unsur dalam tim pengembang kurikulum tidak mengetahui dan memahami pedoman pengembangan kurikulum sekolah sehingga tidak mau terlibat secara mendalam.
- ❖ Sistem informasi manajemen yang dimiliki sekolah belum memberikan akses kepada pemangku kepentingan.
- ❖ Sekolah kurang memahami bahwa ada tahapan yang harus dilalui dalam pengembangan KTSP.
- ❖ Kesibukan tim pengembang kurikulum sekolah sehingga waktu yang dimiliki terbatas untuk menjalankan seluruh prosedur tersebut.
- ❖ Kerjasama dan koordinasi antara kepala sekolah, dewan pendidikan dan komite sekolah belum optimal.
- ❖ Jumlah perangkat yang dikembangkan banyak.
- ❖ Kemampuan tim pengembang kurikulum dalam mengembangkan perangkat kurikulum tingkat satuan pendidikan masih terbatas.
- ❖ Sistem informasi manajemen yang dimiliki sekolah belum menyediakan akses terhadap perangkat KTSP.
- ❖ Hari efektif pembelajaran tidak memenuhi alokasi waktu yang ditentukan.
- ❖ Kompetensi pedagogik pendidik belum optimal.
- ❖ Pendidik tidak menyusun sendiri rencana pembelajaran.

- ❖ Bentuk pendalaman materi yang diketahui pendidik terbatas
- ❖ Muatan lokal bukan merupakan mata pelajaran wajib sehingga kurang diprioritaskan.
- ❖ Jumlah Pendidik yang memiliki kompetensi sesuai bidang pembinaan siswa terbatas.
- ❖ Dana sekolah untuk menyediakan tenaga pembimbing ekstra kurikuler terbatas.

b. Standar Proses

- ❖ Pendidik belum menyusun RPP secara mandiri atau menjiplak dari pendidik lainnya.
- ❖ Pendidik belum paham mekanisme penyusunan RPP.
- ❖ Pendidik tidak mendapat kesempatan aktualisasi diri dalam menyusun RPP.
- ❖ Pengawasan proses pembelajaran tidak berjalan dengan optimal
- ❖ Kompetensi supervisi kepala sekolah dan pengawas rendah.
- ❖ Kesibukan kepala sekolah dan pengawas.
- ❖ Kreatifitas pendidik dalam mengembangkan kreatifitas siswa kurang.
- ❖ Sarana dan prasarana belum memadai.
- ❖ Belum mampu memilih metode pembelajaran yang sesuai.
- ❖ Pendidik belum memanfaatkan sumberdaya yang ada.
- ❖ Pendidik belum menemukan metode pemanfaatan sumber belajar yang tepat.
- ❖ Belum memahami prosedur penilaian otentik dengan baik.
- ❖ Banyaknya instrumen yang digunakan dalam proses pembelajaran.
- ❖ Guru terbatas dapat melakukan penilaian otentik secara komprehensif.
- ❖ Komitmen kepala sekolah dalam menjalankan tugas supervisi belum terlaksana dengan baik.
- ❖ Kunjungan dan pembinaan dari pengawas sekolah tidak berkala dan berkelanjutan.

c. Standar Penilaian

- ❖ Perangkat penilaian terutama untuk penilaian sikap memiliki indikator penilaian yang tidak lengkap.
- ❖ Kemampuan pendidik untuk mendeskripsikan capaian siswa dalam bentuk kalimat yang mendidik masih terbatas.
- ❖ Pemahaman pendidik terhadap proses penilaian masih belum maksimal.

- ❖ Sering terjadinya perubahan peraturan yang berkaitan dengan penilaian.
- ❖ Sekolah belum mampu mengembangkan perangkat penilaian secara mandiri.
- ❖ Kurangnya pembinaan dari pengawas dan penyelenggara pendidikan.
- ❖ Pendidik pada umumnya belum mampu menyusun instrumen penilaian dengan benar.
- ❖ Jumlah siswa melebihi kemampuan pendidik dalam melakukan penilaian.
- ❖ Pendidik pada umumnya tidak menyusun instrumen penilaian dengan benar.

d. Standar PTK

- ❖ Masih ada guru kurang termotivasi untuk meningkatkan kualifikasi akademik.
- ❖ Kurangnya komitmen penyelenggara pendidikan dalam mewujudkan rasio guru terhadap rombongan belajar.
- ❖ Penyelenggara pendidikan masih memperhitungkan kepentingan bisnis.
- ❖ Kurangnya pemahaman tentang kompetensi pedagogik.
- ❖ Paradigma guru dalam pengembangan potensi siswa belum berkembang.
- ❖ Proses pengawasan dan pembinaan dari kepala sekolah dan pengawas tidak ditindaklanjuti oleh penyelenggara pendidikan.
- ❖ Kurangnya pemahaman tentang kompetensi kepribadian, sosial, manajerial, kewirausahaan, dan supervisi.
- ❖ Paradigma kepala sekolah terhadap kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, dan supervisi belum terbentuk
- ❖ Kurangnya komitmen kepala sekolah.
- ❖ Tugas kepala sekolah sangat banyak, sehingga supervisi akademik maupun manajerial yang harusnya dilakukan oleh kepala sekolah sering tidak terlaksana, sehingga kerap kali diserahkan kepada wakil kepala sekolah.
- ❖ Penyelenggara pendidikan selaku pengelola sumber daya manusia kurang memperhatikan tenaga kependidikan.
- ❖ Dana yang dimiliki sekolah terbatas untuk menyediakan tenaga pelaksana administrasi.

e. Standar Sarana dan Prasarana

- ❖ Kesulitan menemukan lahan dengan luas yang sesuai dan harga yang terjangkau untuk sekolah dengan pemukiman padat penduduk.
- ❖ Peraturan zonasi dalam perencanaan tata ruang wilayah kurang optimal.
- ❖ Banyak sekolah rasio luas bangunan belum sesuai dengan jumlah siswa.
- ❖ Luas lahan dan bangunan terbatas.
- ❖ Pembangunan gedung atau ruang baru tidak dirancang, dilaksanakan, dan diawasi secara profesional.
- ❖ Rancangan pembangunan sekolah tidak mengacu pada standar yang telah ditentukan.
- ❖ Dana pembangunan dan pemeliharaan gedung sekolah terbatas.
- ❖ Pengelolaan dana pembangunan dan pemeliharaan rumit.
- ❖ Jumlah siswa dan rombongan belajar melebihi kapasitas.
- ❖ Pemeliharaan sarana dan prasarana tidak berkala dan berkelanjutan.
- ❖ Pengadaan sarana hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah.
- ❖ Sikap tanggungjawab dan rasa memiliki warga sekolah untuk menjaga fasilitas sekolah rendah.
- ❖ Proses pembangunan tidak dilakukan secara professional
- ❖ Belum dituangkan dalam rencana pokok (*master plan*) pengelolaan sarana prasarana.

f. Standar Pengelolaan

- ❖ Kepala sekolah kurang mampu menjalankan tugas kepemimpinan.
- ❖ Kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah belum memenuhi
- ❖ Sumber daya manusia yang kompeten sangat terbatas untuk mengelola sistem informasi.
- ❖ SIM identik berbasis teknologi yang canggih masih minim.
- ❖ Beban guru/tenaga kependidikan tidak mencakup pada pengelolaan informasi.

g. Standar Pembiayaan

- ❖ Sekolah tidak memiliki data siswa tidak mampu.
- ❖ Sumber dana untuk pembebasan biaya yang dimiliki oleh sekolah terbatas.

- ❖ Sistem informasi manajemen yang dikelola sekolah tidak dipelihara dengan baik.
- ❖ Kinerja tenaga kependidikan urusan administrasi kurang optimal.
- ❖ Rendahnya kesadaran dan kepedulian sekolah terhadap permasalahan ekonomi keluarga siswa.
- ❖ Pengambilan keputusan dalam pendanaan bersama pemangku kepentingan menimbulkan konflik internal.
- ❖ Kemampuan pendidik/tenaga kependidikan dalam pengelolaan pendanaan terbatas.
- ❖ Bentuk laporan pengelolaan dana rumit dan merepotkan sekolah.
- ❖ Beban kinerja pendidik/tenaga kependidikan yang diberi tugas sebagai bendahara terlalu banyak sehingga tidak memiliki waktu untuk menyusun laporan tersebut.
- ❖ Sistem informasi manajemen tidak terkelola dengan baik.
- ❖ Kepala sekolah tidak mampu menjalankan tugas kepemimpinan dengan baik.
- ❖ Hubungan antara sekolah dan pemangku kepentingan tidak harmonis.

H. Rekomendasi

Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan merupakan tanggung jawab dari setiap komponen di satuan pendidikan. Sesuai peraturan perundangan yang berlaku setiap satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu sesuai kewenangannya. Untuk melaksanakan hal tersebut, satuan pendidikan disiapkan dan dibimbing oleh Dinas Pendidikan, LPMP, dan lembaga terkait lainnya. Dinas Pendidikan adalah lembaga yang memiliki tanggung jawab terhadap peningkatan mutu pendidikan di wilayah sesuai kewenangan masing-masing.

Berdasarkan analisis kekuatan dan kelemahan pada poin di atas, hal-hal yang perlu dilakukan dalam rangka fasilitasi peningkatan mutu pendidikan, khususnya di Provinsi Bali, yang bertujuan untuk mencapai dan bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan.

Tabel 4.24 Rekomendasi Fasilitasi Peningkatan Mutu Provinsi Bali Tahun 2017

STANDAR	KELEMAHAN	REKOMENDASI
<p style="text-align: center;">ISI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemangku kepentingan kurang dilibatkan dalam penyusunan KTSP. 2. Belum semua sekolah memiliki perangkat KTSP yang dikembangkan. 3. Penyediaan alokasi waktu pembelajaran belum sesuai kurikulum yang berlaku. 4. Penyelenggaraan aspek kurikulum pada muatan lokal masih perlu ditingkatkan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah daerah perlu mendorong sekolah agar dalam pengembangan kurikulum semua unsur harus dilibatkan termasuk konselor dan unsur perguruan tinggi. 2. Pemerintah daerah perlu mendorong sekolah melakukan optimalisasi peningkatan kerjasama dan koordinasi antara kepala sekolah, dewan pendidikan dan komite sekolah. 3. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kompetensi PTK dalam melakukan penyempurnaan KTSP.
<p style="text-align: center;">PROSES</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan proses pembelajaran mengacu silabus yang dikembangkan. 2. RPP yang disusun ada yang belum lengkap dan sistematis. 3. Masih ada RPP yang belum mendapat pengesahan dari kepala sekolah dan pengawas sekolah. 4. Masih ada rombel dengan jumlah siswa belum sesuai ketentuan. 5. Kemampuan guru dalam mengelola kelas masih rendah, belum sepenuhnya mendorong siswa mencari tahu. 6. Guru belum menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. 7. Mengakui atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. 8. Guru masih kurang dalam pemanfaatan TIK dalam pembelajaran dan belum menggunakan aneka sumber belajar. 9. Pengawasan dalam proses pembelajaran masih rendah dalam hal pemantauan, supervisi, evaluasi dan tindak lanjut. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah daerah perlu melakukan pelatihan dalam peningkatan/pengembangan kualitas perangkat pembelajaran. 2. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kompetensi kepala sekolah dalam melakukan supervisi akademik. 3. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kompetensi pedagogik guru.

STANDAR	KELEMAHAN	REKOMENDASI
PENILAIAN PENDIDIKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek penilaian belum sesuai ranah kompetensi. 2. Teknik penilaian masih belum objektif dan akuntabel. 3. Penilaian belum ditindaklanjuti. 4. Instrumen penilaian belum sesuai aspek. 5. Penilaian belum mengikuti prosedur. 	<p>Pemerintah daerah perlu meningkatkan kompetensi pedagogik guru dalam melakukan penilaian.</p>
PTK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih ada guru yang belum berkualifikasi S1/D4. 2. Kompetensi pedagogik guru rendah. 3. Kompetensi kepala sekolah rendah. 4. Tenaga pelaksana urusan administrasi masih perlu ditambah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah daerah perlu mendorong dan menyediakan pembiayaan guru untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya. 2. Pemerintah daerah perlu melakukan peningkatan kompetensi pedagogik guru. 3. Pemerintah daerah perlu melakukan peningkatan kompetensi kepala sekolah. 4. Pemerintah daerah perlu melakukan analisis kebutuhan tenaga pelaksana urusan administrasi. 5. Pemerintah daerah perlu menyediakan tenaga pelaksana urusan administrasi sesuai kebutuhan.
SARPRAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio luas lahan belum sesuai dengan jumlah siswa. 2. Jumlah dan ruang kelas belum sesuai standar. 3. Ruang perpustakaan belum layak pakai. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan peraturan zonasi dalam perencanaan tata ruang wilayah. 2. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pelaksanaan regulasi Zonsi dalam PPDB.

STANDAR	KELEMAHAN	REKOMENDASI
PENGELOLAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan pengelolaan sekolah masih rendah. 2. Pedoman pengelolaan yang dimiliki sekolah belum lengkap 3. Kinerja kepala sekolah rendah. 4. Sistem informasi manajemen belum sesuai ketentuan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kompetensi kepala sekolah. 2. Pemerintah daerah perlu menyediakan/melatih tenaga SDM agar kompeten dalam mengelola sistem informasi.
PEMBIAYAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan pengelolaan dana masih kurang. 2. Laporan belum dapat diakses oleh pemangku kepentingan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah daerah perlu menyediakan/melatih SDM dalam pengelolaan dana sekolah.





BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Komitmen Pemerintah Republik Indonesia dalam Peningkatan mutu pendidikan diterapkan melalui berbagai peraturan perundangan terkait Sistem Pendidikan Nasional. Salah satu kebijakan yang telah diambil adalah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Pemerintah mulai tahun 2016 melakukan pemetaan mutu pendidikan dengan menyediakan aplikasi penjaminan mutu pendidikan (PMP) yang sinkron dengan aplikasi Dapodik. Sistem aplikasi PMP tersebut mengintegrasikan seluruh data dan informasi tentang mutu pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan SNP. Sistem ini bertujuan untuk mendukung proses pemetaan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, daerah dan nasional berdasarkan SNP.

Data dan informasi dalam sistem PMP digunakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan untuk pemetaan mutu dan perencanaan peningkatan mutu sesuai kewenangan masing-masing. Disamping itu, data dan informasi tersebut digunakan untuk memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian SNP pada satuan pendidikan dan/atau program keahlian, dan sebagai acuan pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan

Tahun 2017 satuan pendidikan kembali melakukan pemetaan mutu melalui pengisian instrumen PMP Versi 2.0. Hasil pemetaan mutu PMP khusus Provinsi Bali tahun 2017 menunjukkan bahwa Capaian mutu SNP pada jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada Standar Kompetensi Kelulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan secara

umum dikategorikan menuju SNP-4. Sementara itu pada Standar PTK dan Standar Sarana Prasarana capaian SNP secara umum menuju SNP-2. Sedangkan Capaian mutu SNP pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) sedikit berbeda pada Standar Isi yang capaiannya menuju SNP-3. Lulusan di Provinsi Bali telah memiliki kompetensi sikap sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Disamping itu Beban operasional sekolah juga telah sesuai dengan ketentuan. Pada jenjang SD dan SMP sekolah secara umum telah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan. Output sekolah rendah pada dimensi kompetensi pengetahuan siswa. Hal ini dipengaruhi karena input yang belum optimal terpenuhi dan proses belum berjalan dengan baik. Sehingga pihak terkait perlu melakukan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan.

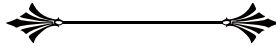
B. Rekomendasi

Program pemetaan mutu yang merupakan bagian dari siklus penjaminan mutu pendidikan internal (SPMI) perlu dilakukan dengan persiapan yang optimal dan berbasis data. Hasil temuan menunjukkan bahwa dalam proses awal pengisian instrumen pemetaan mutu yang merupakan bagian dari evaluasi diri sekolah belum menunjukkan keadaan satuan pendidikan sebenarnya. Responden masih mengalami kebingungan dalam pengisian instrumen. Frekuensi bimbingan teknis dan pendampingan perlu dilakukan lebih banyak lagi baik oleh pengawas maupun LPMP Bali. Bentuk bimbingan teknis dan pendampingan yang motivator perlu ditingkatkan. Pengisian instrumen harus dilakukan dengan integritas dan akuntabel sehingga mampu memotret kondisi satuan pendidikan sebenarnya.

Hasil pemetaan mutu merupakan bahan dasar dalam menyusun perencanaan pemenuhan mutu. Melalui pemetaan mutu dapat diperoleh kekuatan dan kelemahan satuan pendidikan. Kelemahan yang dimiliki satuan pendidikan perlu dianalisis dalam bentuk analisis akar masalah sehingga dapat direkomendasikan kepada pihak terkait menjadi program yang lebih inovatif yang dibutuhkan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan dapat diupayakan melalui berbagai kegiatan fasilitasi peningkatan mutu, seperti: penataran, seminar, pendidikan pelatihan ataupun workshop. Melalui berbagai kegiatan tersebut dapat dikenalkan inovasi- inovasi pembelajaran, karena inovasi adalah sebagai suatu

kebutuhan. Pengembangan bahan ajar, pengembangan strategi dan metode pembelajaran, pengembangan media pembelajaran, sistem penilaian, evaluasi, dan esesmen telah menjadi menu utama dunia pendidikan.

Upaya peningkatan mutu yang dapat membawa perubahan harus dilakukan perbaikan berkesinambungan berkaitan dengan komitmen dan proses oleh satuan pendidikan, dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.



DAFTAR PUSTAKA

Denim, Sudarwan. 2002. Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung : Pustaka Setia

Djaali. 2014. Psikologi Pendidikan. Jakarta : Bumi Aksara

<http://www.pmp.kemdikbud.dikdasmen.go.id/raporNG/index.php>

Kemdikbud. 2017. Indikator Mutu. Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan

Permendikbud Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah

Satori.2016. Pengawasan dan Penjaminan Mutu Pendidikan. Jakarta: Alfabeta

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

